

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK**

**PELAKSANAAN TUGAS CAMAT DALAM MEMBINA PEMERINTAHAN
DESA DI KECAMATAN TUALANG KABUPATEN SIAK**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Strata satu (S1)
Bidang Ilmu sosial Program Studi Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik
Univertsitas Islam Riau



OLEH :

DESI PUTRI PURWANTI
NPM : 167310460

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2022**

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : Desi Putri Purwanti
NPM : 167310460
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Usulan Penelitian : Tugas Camat Dalam Membina Pemerintahan Desa di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak

Format sistematika dan pembahasan masing-masing bab dan sub-bab dalam skripsi ini telah dipelajari dan di nilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diuji dalam sidang ujian komprehensif

Pekanbaru, 25 November 2021

Turut Menyetujui,
Program Studi Ilmu Pemerintahan

Pembimbing

Ketua,

Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP.,M.Si

Rizky Setiawan, S.IP.,M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Desi Putri Purwanti
NPM : 167310460
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Usulan Penelitian : Tugas Camat Dalam Membina Pemerintahan Desa di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak

Naskah Skripsi ini secara keseluruhan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Konfrehensif Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.

Pekanbaru, 15 Maret 2022

Ketua

Rizky Setiawan, S.IP., M.Si

Sekretaris

Data Wardana, S.Sos., M.IP

Anggota

Dr. Khairul Rahman, S.Sos., M.Si

Menyetujui,
Wakil Dekan I

Indra Safri, S.Sos., M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

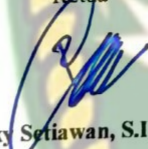
PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Desi Putri Purwanti
NPM : 167310460
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Usulan Penelitian : Tugas Camat Dalam Membina Pemerintahan Desa di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak


Naskah Skripsi ini secara keseluruhan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Konfrehensif Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.

Pekanbaru, 15 Maret 2022

Ketua


Rizky Setiawan, S.IP., M.Si

Sekretaris


Data Wardana, S.Sos., M.IP

Turut Menyetujui,

Wakil Dekan I


Indra Safri, S.Sos., M.Si

Ketua Program
Studi Ilmu Pemerintahan


Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si

PERSEMBAHAN

*Tiada kata yang pantas diucapkan selain rasa syukur kepada Allah SWT yang
Telah memberikan ilmu kepada peneliti, peneliti mempersembahkan skripsi ini*

Sebagai ungkapan rasa hormat dan cinta kasih yang tulus kepada :

Kedua orangtua yang senantiasa memberikan

Dukungan penuh kasih, baik dukungan moril berupa doa

Dan motivasi maupun dukungan materil untuk terus

Melanjutkan pendidikan dan menggapai impian.

Untuk keluarga besarku yang terkasih, yang saya sayangi,

Sahabat-sahabat yang selalu memberikan support

Dan membantu penulis dalam mengerjakan

Skripsi dari awal hingga akhir.

Seluruh teman-teman seperjuangan jurusan Ilmu Pemerintahan

Angkatan 2016, terkhusus IP F yang telah sama sama

Saling menguatkan untuk tetap berjuang menyelesaikan pendidikan ini.

Almometer, Universitas Islam Riau

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada ALLAH SWT yang melimpahkan rahmat, karunia serta hidayahnya kepada penulis, sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini. Sholawat beriring salam selalu penulis hadiahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW karena berkat pengorbanan beliau kita bisa merasakan indahnya ilmu pengetahuan dan islam. Sehingga pada kesempatan ini penulis telah menyelesaikan skripsi dengan judul: **“Tugas Camat Dalam Membina Pemerintahan Desa di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak”** sebagai salah satu syarat guna meraih gelar Sarjana Strata Satu (S1) Studi Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru.

Pada kesempatan ini, penulis juga menyampaikan rasa terimakasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang berkenaan membantu dan memberikan semangat serta dorongan yang bersifat material maupun spiritual terutama penulis menyampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
4. Bapak Rizky Setiawan, S.IP., M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak membantu dan memberikan waktu, bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen khususnya Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah membantu penulis menyelesaikan dalam penulisan skripsi ini.
6. Kepala Tata Usaha dan seluruh staf-staf Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Teristimewa kepada Mama dan Papa tercinta serta keluarga atas kerja keras dan doa restu yang tidak ternilai harganya yang banyak memberikan semangat, motivasi dan melimpahkan kasih sayang tiada henti.

8. Teristimewa penulis ucapkan kepada Rista Srihawani, Riyanto, Herdianto, Suriyani, Leli Siska, dan Ronal Mananti Butar-butar atas dukungan dan kepercayaan serta kasih sayang yang tiada henti dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Terimakasih kepada teman- temanku tersayang yang sudah meluangkan waktu dalam menyelesaikan usulan penelitian ini terutama pada sahabatku Karina Nevani, Febby Hesti, S.IP, Afni Farasti, S.IP, Devi Rahayu Sari, S.IP, Alisa Maharani, S.IP dan teman-teman kelas IP F 2016.
10. Terimakasih penulis ucapkan kepada Muhammad Nanda Khairul, S.H yang selalu memberi dukungan moril maupun materil serta do'a yang tiada hentinya kepada penulis dalam menyelesaikan tulisan ini.
11. Kepada Pemerintah Kecamatan dan masyarakat Kecamatan Tualang yang telah membantu penulis menyelesaikan dalam penulisan usulan penelitian ini.

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu menyelesaikan penulisan usulan penelitian ini. Penulis berharap semoga skripsi yang penulis kerjakan ini mendapat keridhoan dari ALLAH SWT dan berguna bagi penulis sendiri serta bermanfaat bagi para pembaca dan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, Aamiin Ya Allah.

Pekanbaru, 15 Maret 2022

Desi Putri Purwanti

167310460

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN PERSETUJUAN	ii
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
DAFTAR PERNYATAAN	xv
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	15
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	15
a. Tujuan Penelitian	15
b. Kegunaan Penelitian	16
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	
A. Studi Kepustakaan.....	17
1. Konsep Pemerintahan	17
2. Konsep Ilmu Pemerintahan	21
3. Konsep Desa	23
4. Konsep Pemerintahan Desa	24
5. Kecamatan.....	25
6. Pembinaan.....	29
7. Pelaksanaan.....	31
B. Penelitian Terdahulu.....	35
C. Kerangka Pikir.....	35
D. Proposisi.....	36

E. Konsep Operasional.....	37
F. Operasional Variabel	38

BAB III METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian.....	39
B. Lokasi Penelitian	40
C. Informan dan Key Informan.....	40
D. Teknik Penarikan Informan	41
E. Jenis dan Sumber Data	41
F. Teknik Pengumpulan Data	42
G. Teknik Analisis Data.....	43
H. Unit Analisis Hasil Penelitian	45

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Kondisi Umum Kabupaten Siak.....	47
1. Luas dan Batas Wilayah.....	47
2. Letak dan Kondisi Geografis	48
3. Topografi.....	48
4. Geologi.....	49
5. Klimatologi	49
B. Sejarah Kabupaten Siak.....	49
C. Kondisi Umum Kecamatan Tualang	52
1. Letak Geografis Kecamatan Tualang.....	52
2. Jumlah Penduduk, Mata Pencaharian, Tingkat Pendidikan dan Sarana Prasarana	54
3. Struktur Organisasi Kantor Camat Tualang.....	58

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Informan	59
1. Jenis Kelamin Informan	60
2. Usia Informan	61
3. Pendidikan Informan.....	61

4. Pekerjaan Informan	62
B. Hasil dan Pembahasan	63
1. Memberikan Bimbingan	64
2. Memberikan Pengarahan	67
3. Memberikan Pendidikan dan Pelatihan	70
4. Literature Buku Petunjuk	71
C. Hasil Observasi	72
D. Faktor Penghambat Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Membina Pemerintahan Desa di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak	73
BAB VI PENUTUP	
A. Kesimpulan	75
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN	81



DAFTAR TABEL

	Halaman
I.I : Jumlah Penduduk Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.....	5
I.II : Banyaknya Kepala Keluarga, Penduduk dan Rata-rata Penduduk per Kepala Keluarga Kecamatan Tualang Kabupaten Siak	6
I.III : Luas Wilayah, Penduduk dan Kepadatan Penduduk per Desa di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.....	7
II.I : Penelitian Terdahulu	35
II.II : Operasional Penelitian Variabel Tentang Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Membina Pemerintahan Desa di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak	38
III.I : Rincian Jumlah Informan dan Key Informan Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Membina Pemerintahan Desa di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak	41
IV.I : Jumlah Penduduk Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.....	55
IV.II : Mata Pencaharian Masyarakat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak	55
IV.III : Tingkat Pendidikan Penduduk Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.....	56
IV.IV : Sarana dan Prasarana Kecamatan Tualang Kabupaten Siak	57
V.I : Klasifikasi Informan Berdasarkan Jenis Kelamin.....	60
V.II : Klasifikasi Informan Berdasarkan Usia	61
V.III : Klasifikasi Informan Berdasarkan Pendidikan	62
V.IV : Klasifikasi Informan Berdasarkan Jenis Pekerjaan.....	63

DAFTAR GAMBAR

Halaman

II.I	: Kerangka Pikir Tentang Pelaksanaan Tugas Camat dalam Membina Pemerintahan Desa di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.....	36
IV.I	: Struktur Organisasi Kantor Camat Tualang.....	58



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Dokumentasi Penelitian.....	81
Lampiran 2 Wawancara Penelitian	84
Lampiran 3 Surat Keputusan Dekan FISIPOL UIR tentang Penetapan Dosen Pembimbing Penulisan Skripsi Mahasiswa	86
Lampiran 4 Surat Rekomendasi Riset Dari Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik...	87
Lampiran 5 Surat Rekomendasi dari Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau	88
Lampiran 6 Surat Rekomendasi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Siak	89
Lampiran 7 Surat Keterangan dari Kantor Camat Tualang	90
Lampiran 8 Surat Keterangan Lulus Plagiasi Skripsi.....	91



SURAT PERNYATAAN

Saya Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta Ujian Skripsi yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Desi Putri Purwanti
NPM : 167310460
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Judul Skripsi : Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Membina Pemerintahan Desa di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian konferensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa naskah skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa keseluruhan persyaratan administrasi, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 07 Maret 2022


Desi Putri Purwanti



**PELAKSANAAN TUGAS CAMAT DALAM MEMBINA PEMERINTAHAN
DESA DI KECAMATAN TUALANG KABUPATEN SIAK**

ABSTRAK

Desi Putri Purwanti

167310460

Penelitian ini dilatarbelakangi berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan yang mana pada pasal 10 huruf (g) bertuliskan mengenai Tugas Camat dalam membina penyelenggaraan pemerintahan desa. Permasalahan yang terjadi di Desa Pinang Sebatang yakni masih banyaknya keluhan yang dirasakan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan aparatur desa. Adapun penelitian ini adalah untuk mengetahui pembinaan apa saja yang telah dilakukan oleh Camat terhadap Pemerintahan Desa Pinang Sebatang. Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif. Lokasi penelitian ini adalah di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak. Fokus penelitian ini menggunakan empat bentuk pembinaan antara lain: pemberian bimbingan, pemberian pengarahan, pemberian pendidikan dan pelatihan, literature buku petunjuk. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam skripsi ini yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pembinaan oleh camat telah dilakukan tetapi masih terdapat beberapa keluhan dari masyarakat. Keluhan ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman aparatur desa terhadap pentingnya memberikan pelayanan semaksimal mungkin kepada masyarakat. Saran yang dapat diambil dari penulis adalah aparatur desa harus lebih mengedepankan pemberian pelayanan semaksimal mungkin, meningkatkan sumber daya manusia agar lebih berkompeten dalam menjalankan tugasnya serta lebih sering melaksanakan sosialisasi tentang pentingnya memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Kata kunci : Pelaksanaan, Tugas Camat, Pembinaan, Pemerintahan, Desa

**THE IMPLEMENTATION OF THE SUB DISTRICT HEAD DUTIES IN
FOSTERING VILLAGE GOVERNMENT IN THE TUALANG SUB DISTRICT
SIAK REGENCY**

ABSTRACT

Desi Putri Purwanti

167310460

This research is based on Government Regulation no. 17 of 2018 concerning the District which in article 10 letter (g) reads about the Sub district head Duties in fostering the administration of village governance. The problem that occurs in Pinang Sebatang Village is that there are still many complaints that are felt by the community against the services provided by the village apparatus. The purpose of this research is to find out what guidance has been carried out by the Sub district head to the Pinang Sebatang Village Government. This study uses a qualitative approach. The location of this research is in Tualang District, Siak Regency. The focus of this research uses four forms of coaching, including: providing guidance, providing direction, providing education and training, and manual literature. Data collection techniques used in this thesis are interviews, observation, and documentation. The results showed that the implementation of coaching by the sub-district head had been carried out but there were still some complaints from the community. This complaint is caused by the lack of understanding of the village apparatus on the importance of providing the maximum possible service to the community. The suggestion that can be taken from the author is that the village apparatus should prioritize the provision of services as much as possible, increase human resources to be more competent in carrying out their duties and carry out socialization more often about the importance of providing the best service for the community.

Keywords : Implementation, Sub district head duties, Coaching, Village government

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional merupakan kewajiban antara pemerintah dan rakyat secara keseluruhan, pemerintah berkewajiban untuk menyediakan sarana dan prasarana pembangunan dan masyarakat berkewajiban untuk berperan secara aktif dalam setiap gerak langkah pembangunan.

Melalui Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan peluang dan kesempatan bagi desa dalam memberdayakan desa dan masyarakatnya untuk mewujudkan pemerataan pembangunan dan pelayanan secara optimal, dengan kata lain bahwa negara memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi. Menurut penjelasan Undang-undang tersebut pemberian otonomi diarahkan untuk:

1. Mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat.
2. Meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengembangan dan pembangunan otonomi daerah tetap dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dan diarahkan untuk memberikan kewenangan-kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah yang langsung berhubungan dengan masyarakat sehingga lebih meningkatkan pelayanan dan partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan disegala bidang di daerah khususnya maupun nasional pada umumnya.

Agar pembangunan nasional sesuai dengan sasaran, maka pelaksanaannya dapat diarahkan kepada daerah untuk mengatur dan juga mengurus kegiatan pembangunan sendiri. Pembangunan daerah yang merupakan bagian inti dari pembangunan nasional mencakup seluruh segi kehidupan masyarakat, pelaksanaan pembangunan yang ditujukan demi kemakmuran rakyat tersebut, penyelenggaraannya dilakukan menyeluruh hingga ke pelosok daerah.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan melalui peningkatan pelayanan masyarakat. Berdasarkan paradigma tersebut aparat pemerintah daerah khususnya aparat pemerintah kecamatan dituntut untuk dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

Penjelasan undang-undang tersebut selaras dengan tuntutan rakyat yang mengkehendaki suatu penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta berwawasan pelayanan kepada masyarakat.

Secara teoritis otonomi daerah akan dapat menciptakan kesejahteraan antara pemerintah daerah sebagai penyedia jasa dan juga masyarakat sebagai penerima jasa. Pelayanan umum adalah merupakan bagian kebijakan pemerintah untuk memperbaiki kesejahteraan serta peningkatan modal manusia. Dengan demikian akan membawa dampak pada produktivitas masyarakat dimasa yang akan datang dan pada saat yang sama pelayanan umum itu secara langsung memenuhi konsumsi dasar yang merupakan tujuan dari kebijakan pemerintah dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Pemerintah desa selalu berkaitan erat dengan pelayanan masyarakat dan dapat dikategorikan efektif apabila masyarakat mendapatkan kemudahan pelayanan dengan

prosedur yang singkat, biaya murah, tepat dan memuaskan. Keberhasilan meningkatkan efektifitas ditentukan oleh faktor kemampuan pemerintahan dalam meningkatkan disiplin kerja aparat pelayanan.

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada BAB I pasal 1 yaitu “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”

Dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia posisi Kecamatan berkedudukan sebagai perangkat daerah kabupaten/kota sekaligus penyelenggara urusan pemerintahan umum. Sebagai pelaksana perangkat daerah kabupaten/kota, camat melaksanakan sebagian kewenangan bupati/wali kota yang dilimpahkan dan sebagai penyelenggara urusan pemerintahan umum, camat secara berjenjang melaksanakan tugas Pemerintah Pusat di wilayah Kecamatan.

Dengan kedudukannya tersebut, Kecamatan mempunyai peran yang sangat strategis di kabupaten/kota, baik dari tugas dan fungsi, organisasi, sumber daya manusia, dan sumber pembiayaannya sehingga perlu pengaturan tersendiri yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan dengan Peraturan Pemerintah.

Pelimpahan sebagian kewenangan bupati/wali kota kepada camat dilaksanakan untuk mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kecamatan dan

mengoptimalkan pelayanan publik di Kecamatan sebagai perangkat daerah yang berhadapan langsung dengan masyarakat.

Desa menjadi bagian dari pengaturan dalam Peraturan Pemerintah ini dikarenakan berdasarkan kedudukannya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Desa bukan lagi merupakan perangkat daerah, namun merupakan perangkat Kecamatan.

Dalam rangka pembangunan sarana dan prasarana dan pemberdayaan masyarakat di Desa, dialokasikan anggaran untuk Desa di daerah kota paling sedikit 5% (lima persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus. Sedangkan untuk daerah kabupaten, alokasi anggarannya paling sedikit sebesar alokasi dana desa terendah yang diterima oleh desa di kabupaten/kota.

Tabel I.I Jumlah Penduduk Kecamatan Tualang Kabupaten Siak

No	Nama desa/kelurahan	Jumlah penduduk
1	Maredan	3.426
2	Tualang	15.772
3	Pinang sebatang	4.696
4	Maredan barat	2.829
5	Perawang	43.908
6	Perawang barat	23.327
7	Pinang sebatang barat	5.183
8	Pinang sebatang timur	9.521
9	Tualang timur	6.226
	Jumlah	114.888

Sumber: Kantor Camat Tualang Kabupaten Siak, Tahun 2020

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Kecamatan Tualang memiliki 9 (sembilan) desa. Jumlah penduduk terbanyak terdapat di desa Perawang yakni sebanyak

43.908 jiwa, sedangkan desa dengan jumlah penduduk terbanyak kedua terdapat di desa Perawang barat dengan 23.327 jiwa. Jika ditotal jumlah penduduk dari seluruh desa yang berada di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, maka memiliki jumlah penduduk 114.888 jiwa.

Sedangkan desa dengan penduduk paling sedikit terdapat di desa Maredan Barat Kecamatan Tualang dengan jumlah 2.829 jiwa. Dan dapat kita lihat juga dari tabel diatas desa dengan penduduk paling sedikit kedua yaitu desa Maredan dengan 3.426 jiwa. Namun desa Pinang sebatang Timur dan desa Pinang Sebatang hanya memiliki sedikit selisih jumlah penduduk yakni 487 jiwa.

Tabel I.II Banyaknya Kepala Keluarga, Penduduk dan Rata-rata Penduduk Per Kepala Keluarga Kecamatan Tualang

No	Nama desa/kelurahan	Jumlah penduduk	Kepala keluarga	Rata-rata
1	Maredan	3.426	847	4,04
2	Tualang	15.772	3.083	5,11
3	Pinang sebatang	4.696	1.218	3,85
4	Maredan barat	2.829	636	4,44
5	Perawang	43.908	12.030	3,64
6	Perawang barat	23.327	4.759	4,90
7	Pinang sebatang barat	5.183	1.504	3,44
8	Pinang sebatang timur	9.521	2.743	3,47
9	Tualang timur	6.226	1.814	3,43
	Jumlah	114.888	28.634	4,03

Sumber: Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, 2020

Dari tabel diatas dapat dilihat banyaknya jumlah kepala keluarga disetiap desa/kelurahan di Kecamatan Tualang. Kepala keluarga terbanyak terdapat di desa Perawang, yakni 12.030 kepala keluarga. Jika total dari keseluruhan kepala keluarga yang ada di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak yakni 28.634 kepala keluarga.

Jika dibandingkan antara jumlah penduduk dan kepala keluarga di Kecamatan Tualang, Rata-rata terbesar 4,90 terdapat pada desa Perawang Barat dengan jumlah penduduk 23.327 jiwa dan 4.759 kepala keluarga. Dan rata-rata terendah 3,43 terdapat di desa Tualang Timur dengan jumlah penduduk 6.226 jiwa dan 1.814 kepala keluarga. Total rata-rata dari seluruh desa di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak yaitu 4,03.

Tabel I.III Luas Wilayah, Penduduk dan Kepadatan Penduduk Per Desa di Kecamatan Tualang

Sumber: Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, 2020

No	Nama desa/kelurahan	Jumlah penduduk	Luas (Km2)	Kepadatan penduduk
1	Maredan	3.426	145,25	23
2	Tualang	15.772	33,08	476
3	Pinang sebatang	4.696	40,88	114
4	Maredan barat	2.829	28,98	97
5	Perawang	43.908	20	2.195
6	Perawang barat	23.327	45,18	516
7	Pinang sebatang barat	5.183	21,46	241
8	Pinang sebatang timur	9.521	38,16	249
9	Tualang timur	6.226	9,98	623
	Jumlah	114.888	373,75	504

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa kepadatan penduduk terbesar di Kecamatan Tualang terletak di desa Perawang dengan 2.195 kepadatan penduduk.

Sedangkan desa dengan kepadatan penduduk terendah terletak di Maredan dengan hanya 23 kepadatan penduduk.

Pembinaan yang dilakukan camat akan selalu tercatat didalam buku harian camat atau catatan kegiatan kecamatan, di bawah ini adalah bentuk-bentuk pembinaan yang sudah dilakukan oleh Camat Tualang kepada pemerintah desa.

Tabel I.IV Jadwal pembinaan oleh Camat Tualang, 2020

Bulan	Tanggal	Kegiatan
Januari	12/01/2020	Musyawarah Pembahasan Rencana Kerja
	19/01/2020	Pemerintah Desa (RKD) tahun anggaran 2020.
	23/01/2020	Rapat Koordinasi Kecamatan.
	26/01/2020	Pembinaan Peraturan Desa Tahun 2020. Rapat Koordinasi.
Februari	07/02/2020	Menghadiri Acara Lomba Memancing Desa Perawang.
	11/02/2020	Musyawarah Desa Pertanggungjawaban Tahunan (MDPT) Pinang Sebatang Barat.
	16/02/2020	Musyawarah Desa Pertanggungjawaban Tahunan (MDPT) Maredan.
	21/02/2020	Musyawarah Desa Pertanggungjawaban Tahunan (MDPT) Pinang Sebatang.
	22/02/2020	Musyawarah Desa Pertanggungjawaban Tahunan (MDPT) Pinang Sebatang.
Maret	17/03/2020	Pembinaan Lomba Desa Sanitas Total Berbasis Masyarakat (STBM) Tahun 2020.
April	19/04/2020	Rapat Pembinaan Administrasi PKK (melalui daring).
	20/04/2020	Rapat Pembinaan Administrasi PKK (melalui daring).

Mei	-	-
Juni	09/06/2020	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan yang sudah dilaksanakan SKPD dan Desa.
	12/06/2020	Rapat Kerja dengan Kepala Desa Perawang Barat.
Juli	13/07/2020	Rapat Kerja dengan Kepala Desa Tualang Timur.
	15/07/2020	Rapat Kerja dengan Kepala Desa Pinang Sebatang Timur.
	20/07/2020	Rapat Kerja dengan Kepala Desa Maredan Barat.
Agustus	04/08/2020	Musyawarah Pembangunan di Desa Maredan.
	17/08/2020	Pembinaan Administrasi PKK

Sumber: Kantor Camat Tualang Kabupaten Siak, 2020

Dari data diatas yang penulis dapat dari Kantor Camat Tualang, Camat telah melakukan pembinaan dengan cukup baik, pembinaan yang tersebut dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, dengan melakukan berbagai kegiatan tersebut diharapkan dapat menunjang pengetahuan dan kreatifitas kepada aparatur pemerintahan desa.

Merupakan kewajiban dan tugas bagi seorang Camat memberikan kinerja terbaiknya dalam membangun sebuah daerah menjadi lebih baik dari sebelumnya. Dengan bertambahnya pengetahuan dan kreatifitas aparatur pemerintahan menjadi jembatan untuk menuju tujuan tersebut.

Dalam PP Nomor 17 Tahun 2018 pasal 10 Tentang Kecamatan, pemerintah menetapkan beberapa tugas yang harus dipenuhi oleh Camat dalam memimpin Kecamatan, yaitu:

- a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum.
- b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi:
 1. partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/Kelurahan dan Kecamatan;
 2. sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan;
 3. efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan dan
 4. pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada bupati/wali kota;
- c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, meliputi:
 1. sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan;
 2. harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan
 3. pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada bupati/wali kota;
- d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, meliputi:

1. sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 2. pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada bupati/walikota;
- e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, meliputi:
1. sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait;
 2. pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta; dan
 3. pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada bupati/wali kota;
- f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan, meliputi:
1. sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait;
 2. efektivitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan; dan
 3. pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada bupati/wali kota;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa;

h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan, meliputi:

1. perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
2. fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
3. efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan;
4. Pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan kepada bupati/wali kota melalui sekretaris daerah

i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari PP Nomor 17 Tahun 2018 Pasal 10 dalam Poin (g) tertulis membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa;

Tugas camat dalam membina pemerintahan desa dan/kelurahan meliputi:

- a. Melakukan pembinaan tertip administrasi pemerintahan desa dan/kelurahan
- b. Memberikan bimbingan supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/kelurahan
- c. Melakukan pembinaan terhadap kepala desa dan/lurah
- d. Melakukan pembinaan terhadap perangkat desa dan/kelurahan
- e. Melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/kelurahan
- f. Melaporkan pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/kelurahan ditingkat kecamatan kepada bupati/walikota.

Salah satu hal penting dalam kegiatan pemerintahan daerah khususnya di desa dan kecamatan adalah masalah koordinasi pemerintahan dan hal yang menentukan terhadap

terlaksananya koordinasi adalah kesiapan sumber daya manusia aparatur pemerintah kecamatan dan desa dalam pelaksanaan wewenang dari daerah yang merupakan suatu tuntutan profesionalitas aparatur pemerintah yang berarti memiliki kemampuan pelaksanaan tugas.

Adanya komitmen dalam kualitas kerja, dedikasi terhadap kepentingan masyarakat sebagai pihak yang dilayani oleh pemerintah daerah, dalam hal ini kepentingan publik adalah utama, maka menjadikan administrator publik menjadi proaktif adalah suatu kewajiban, yaitu administrator publik yang selalu berusaha meningkatkan respon yang adil serta meningkatkan kualitas dirinya.

Menurut Wasistono, (2001:38) dalam rangka melaksanakan tugas pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa, dikembangkan pola hubungan kerja antara camat dengan kepala desa, antara lain:

1. Hubungan kerja fasilitatif
Camat menjadi penghubung antara desa dengan kebijakan dari pemerintah kabupaten;
2. Hubungan kerja Koordinatif
Camat mengkoordinasikan kegiatan (baik rutin maupun pembangunan) bagi desa-desa yang ada diwilayah agar memenuhi asas sinkronisasi dan integrasi, hasilnya di sampaikan kepada bupati;
3. Hubungan kerja sama
Camat yang memimpin satuan unit pemerintahan bekerjasama dengan kepala desa yang memimpin suatu unit pemerintahan dalam kedudukan setara untuk mencapai tujuan bersama;
4. Hubungan pembinaan dan kerjasama

Apabila memperoleh delegasi kewenangan dari bupati, camat dapat melaksanakan fungsi pembinaan terhadap jalannya pemerintahan desa, termasuk mengatasi konflik intra dan antar pemerintahan desa.

Kecamatan Tualang adalah salah satu kecamatan yang berada dibawah pemerintahan Kabupaten Siak, kecamatan Tualang sendiri memiliki jumlah desa yang cukup banyak yakni terdapat 9 desa dan/atau kelurahan, salah satunya Desa Pinang Sebatang. Mengingat banyaknya jumlah penduduk tentu saja dibutuhkan seorang pemimpin yang kompeten menjalankan perannya. Dalam praktik penyelenggaraan sistem pemerintahan belum berjalan sebagaimana mestinya. Salah satu tugas camat yaitu membina pemerintahan desa, baik segi administratif maupun secara langsung membina kepala desa/kelurahan. Namun masi banyaknya keluhan-keluhan mengenai kurangnya pelayanan yang diberikan pemerintahan desa kepada masyarakat.

Rendahnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan dan masih adanya keluhan yang berasal dari masyarakat mengenai pelayanan yang diberikan, jelas terlihat bahwa camat masih belum maksimal dalam melakukan pembinaan sebagaimana disebutkan dalam pasal 10 PP Nomor 17 Tahun 2014 tersebut. Selain itu hubungan antara kecamatan dan desa masi belum terjalin dengan baik sehingga masalah ini masih belum terselesaikan.

Lebih jelasnya menurut survey yang dilakukan terdapat adanya fenomena mengenai Pelaksanaan Tugas Camat dalam Membina Pemerintahan Desa Pinang Sebatang antara lain:

1. Pembinaan tertib administrasi Pemerintahan Desa yang seharusnya dilakukan oleh camat kepada Pemerintah Desa belum sepenuhnya terlaksana, hal ini ditandai dengan

adanya Pemerintah Desa yang tidak diberikan/ menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa, seperti temuan penulis di Desa Pinang Sebatang

2. Camat belum menjalankan pembinaan secara optimal, dilihat kurangnya pelatihan dalam menjalankan pemerintahan desa, terlihat pada Desa Pinang Sebatang pemerintahan desa hanya dijalankan oleh kepala desa, dan kurangnya peran BPD dalam menjalankan Pemerintahan Desa. Tentu ini menjadi perhatian oleh camat dalam penyelenggaraan pembinaan pemerintahan desa.

Dari fenomena diatas diketahui masyarakat masih sangat jauh dari kata puas terhadap pelayanan yang diberikan pemerintahan desa sehingga, dengan demikian penulis ingin melakukan penelitian dengan judul: **“Pelaksanaan Tugas Camat dalam Membina Pemerintahan Desa di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak”**

B. Rumusan Masalah

Melihat latar belakang diatas, maka yang menjadi pokok bahasan peneliti adalah Pelaksanaan Tugas Camat dalam Membina Pemerintahan Desa di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak. Untuk membahas penelitian ini lebih lanjut, maka peneliti merumuskan pertanyaan sebagai berikut: Bagaimana Pelaksanaan Tugas Camat dalam Membina Pemerintahan Desa di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak ?

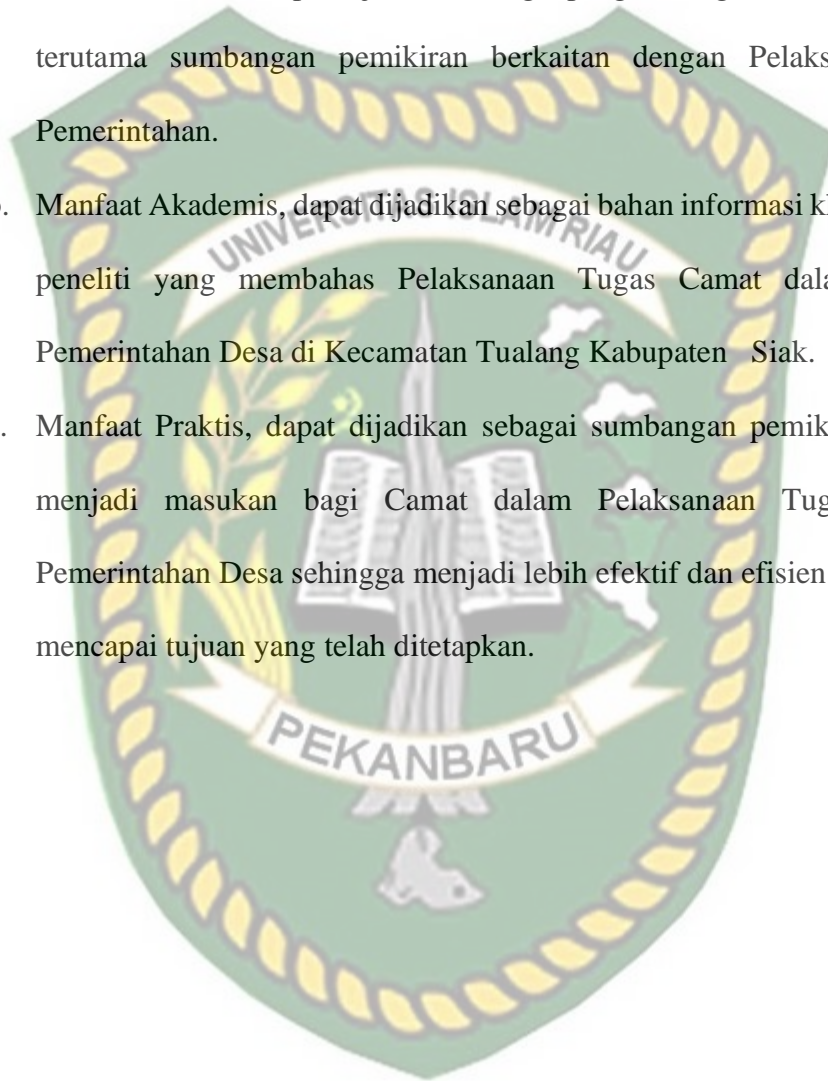
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian adalah:
 - a. Untuk mengetahui Pelaksanaan Tugas Camat dalam Membina Pemerintahan Desa di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.

- b. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat Pelaksanaan Tugas Camat dalam Membina Pemerintahan Desa di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.

2. Kegunaan Penelitian adalah:

- a. Manfaat Teoritis, dapat dijadikan sebagai pengembangan ilmu pemerintahan terutama sumbangan pemikiran berkaitan dengan Pelaksanaan Tugas Pemerintahan.
- b. Manfaat Akademis, dapat dijadikan sebagai bahan informasi khususnya bagi peneliti yang membahas Pelaksanaan Tugas Camat dalam Membina Pemerintahan Desa di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.
- c. Manfaat Praktis, dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran sehingga menjadi masukan bagi Camat dalam Pelaksanaan Tugas Membina Pemerintahan Desa sehingga menjadi lebih efektif dan efisien guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan.



BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

1. Pemerintahan

Pemerintahan berasal dari kata “pemerintah” yang setelah ditambahkan awalan “pe” menjadi perintah, dan setelah ditambah akhiran “an” menjadi “pemerintahan” dalam hal ini beda antara pemerintah dengan pemerintahan adalah pemerintah merupakan badan atau organisasi yang bersangkutan, sedangkan pemerintahan berarti perihal ataupun ikhwal pemerintahan sendiri (Inu Kencana Syafie 2011:4)

Menurut Pamudji (1992:22) secara etimologis, pemerintahan berasal dari kata pemerintah, sedangkan pemerintah berasal dari kata perintah. Menurut kamus kata-kata tersebut mempunyai arti sebagai berikut:

- a. *Perintah* adalah perkataan yang bermaksud menyuruh melakukan sesuatu.
- b. *Pemerintah* adalah kekuasaan memerintah sesuatu Negara (daerah Negara) atau badan yang tertinggi yang memerintah sesuatu Negara (seperti kabinet merupakan suatu pemerintah)
- c. *Pemerintahan* adalah perbuatan (cara, hal urusan dan sebagainya memerintah).

Menurut Ermaya (dalam Nawawi 2013:19) mendefinisikan pemerintahan dapat berarti luas atau berarti sempit. Pemerintahan dalam arti luas adalah segala kegiatan badan-badan public yang meliputi kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam usaha mencapai tujuan Negara, sedangkan dalam arti sempitnya

pemerintahan adalah segala kegiatan badan-badan public yang hanya meliputi kekuasaan eksekutif.

Pemerintah menurut Sumaryadi (dalam Rahyunir dan Munaf Yusri 2015:30) dalam bahasa inggris disebut government yang berasal dari bahasa latin, gubernare, greek kyberman, yang berarti mengemudi, atau mengendalikan. Tujuan pemerintah meliputi external security, internal order, general welfare, dan freedom.

Pemerintahan (governance) adalah proses pemenuhan, perlindungan kebutuhan, kepentingan manusia, dan masyarakat. Semua badan atau organisasi yang berfungsi memenuhi, melindungi kebutuhan, kepentingan manusia dan masyarakat disebut pemerintah (Rauf dan Munaf 2015:31).

Pemerintahan merupakan gejala yang lebih umum dibandingkan terminology pemerintah itu sendiri. Pemerintahan menunjukkan pada aktivitas kekuasaan dalam berbagai ranah public. Pemerintah tidak saja menunjukkan pada pemerintah itu sendiri, namun berkaitan pula pada aktivitas dalam berbagai konteks kelembagaan dengan tujuan mengarahkan, mengendalikan, mengatur semua hal yang berkaitan dengan ranah public seperti kepentingan Warga Negara, pemilik suara maupun para pekerja (Muhadam Labolo 2006:20).

Menurut Sadarmayanti (2004:9) pemerintah yang baik dapat dikatakan sebagai pemerintah yang menghormati kedaulatan rakyat, yang memiliki tugas pokok yang mencakup :

- a. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
- b. Memajukan kesejahteraan umum
- c. Mencerdaskan kehidupan bangsa

d. Melaksanakan ketertiban umum, perdamaian abadi dan keadilan sosial

Secara umum tugas-tugas pokok pemerintahan menurut Ryaas Rasyid (1997:13) antara lain:

1. Menjamin keamanan Negara dan segala kemungkinan serangan dari luar dan menjaga agar tidak terjadi pemberontakan didalam yang dapat menggulingkan pemerintahan yang sah melalui cara-cara kekerasan.
2. Memelihara ketertiban dengan mencegah terjadinya keributan diantara warga masyarakat, menjamin agar perubahan aparatur yang terjadi didalam masyarakat dapat berlangsung secara damai.
3. Peraturan yang adil kepada setiap warga masyarakat tanpa membedakan status apapun yang melatarbelakangi keberadaan mereka.
4. Melakukan pelayanan umum dengan memberikan pelayanan dalam bidang-bidang yang tidak sah mungkin dikerjakan oleh lembaga non pemerintah.
5. Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.
6. Menerapkan kebijakan yang menguntungkan masyarakat luas.
7. Menerapkan kebijakan untuk memelihara sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Finer (dalam Chaidir, 2008:85) istilah Government paling sedikit mempunyai arti:

- a. Menunjukkan kegiatan atau proses memerintah, yaitu melaksanakan control atas pihak lain (*the activity of the process of governing*).
- b. Menunjukkan masalah-masalah (hak ikwal) Negara dalam mana kegiatan atau proses diatas dijumpai (*states of affairs*).

- c. Menunjukkan orang-orang (maksudnya pejabat-pejabat) yang dibebani tugas-tugas untuk memerintah (*people charged with the duty of governing*)
- d. Menunjukkan cara, metode atau sistem dengan mana suatu masyarakat tertentu diperintah (*the manner, method or system by which a particular society is governed*)

Menurut Budiardjo (2009:21) pemerintah adalah segala kegiatan yang terorganisasi yang besumber kepada kedaulatan dan kemerdekaan, berdasarkan atas Negara, Rakyat atau penduduk dan wilayah suatu Negara memiliki tujuan untuk menjadikan Negara berdasarkan konsep dasar negara tersebut.

Menurut Rasyid (dalam Labolo 2008:25) tujuan dibentuknya pemerintahan adalah untuk menjaga sistem ketertiban dimana masyarakat bisa menjalani kehidupan secara wajar.

2. Ilmu Pemerintahan

Secara umum, kajian pemerintahan dalam perspektif keilmuan masih terbatas jika dilihat perkembangan dewasa ini. Hal ini disebabkan posisi ilmu pemerintahan yang bersifat tradisional dari kajian ilmu lain seperti politik dan hukum. Disebut tradisional karena ilmu pemerintahan terkesan sulit mengidentifikasi dirinya secara tegas dari bayang-bayang ilmu lain tersebut.

Secara klasik, pendekatan yang sering dilakukan melalui celah ilmu politik yang kemudian melahirkan pemahaman tentang praktek pemerintahan dari keseluruhan perangkat yang melalui cabang-cabang kekuasaan. Dari sini pemerintah diartikan sebagai pelembagaan kekuasaan yang dioperasionalkan secara kongret dari jenjang paling puncak hingga entitas pemerintahan daerah. Dengan kata lain

pemerintahan hanyalah pernyataan kongkret dari fenomena kekuasaan yang lebih luas, dimana kekuasaan dengan segala atributnya dipelajari secara seksama dalam kacamata ilmu politik. Praktisnya pemerintahan dipelajari sebagai teknik mengelola kekuasaan dalam intuisi yang dibentuk secara berjenjang. Akhirnya, transisi ilmu pemerintahan tampak seperti bergerak paksa menuju indentifikasi diri, lepas dari rahim kekuasaan yang karena itu terasa tetap berbau ilmu pololitik murni (Labolo, 2008:1).

Menurut Ndraha (2011:7) mendefenisikan ilmu pemerintahan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana pemerintah (unit kerja public) bekerja memenuhi dan melindungi tuntutan (harapan, kebutuhan) tiap orang akan jasa public dan layanan sivil, dalam hubungan pemerintahan.

Ilmu Pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan pengurusan koordinasi pada bidang pengurusan, pengaturan, kepemimpinan, dan koordinasi pemerintahan baik pusat dengan daerah, rakyat dengan pemerintahnya (Inu Kencana Syafii 2011:15)

Ketika definisi ilmu pemerintahan (bustuurskunde) dipelajari dan diterbitkan melalui buku *Algemene Inleiding tot Bestuurskunde* karya Poulje, dan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh B. Mang Reng Say dibawah judul *Pengantar Ilmu Pemerintahan* (1959), ilmu itu didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk memimpin hidup bersama manusia kearah kebahagiaan yang sebesar-besarnya tanpa merugikan orang lain secara tidak sah (Taliziduhu Ndraha 1997:16).

Poulje (dalam Ndraha 2011:16) menegemukakan bahwa ilmu pemerintahan merupakan sebuah ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk memimpin hidup bersama

manusia kearah kebahagiaan yang sebesar-besarnya tanpa merugikan orang lain secara tidak sah.

Ilmu pemerintahan sebagai ilmu yang mempelajari tentang kinerja aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk mewujudkan tujuan Negara (Supriyanto 2009:26)

Di indonesia, ilmu pemerintahan didefinisikan dengan pengertian yang berbeda-beda. Affan Gaffar (dalam Ndraha 2010:16) mendefinisikan ilmu pemerintahan itu sebagai ilmu yang mempelajari proses politik dalam penyelenggaraan pemerintahan di sebuah Negara.

3. Desa

Bintaro (dalam Nurcholis 2011:4) Desa adalah perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis sosial ekonomis, politis dan juga cultural yang terdapat disitu dalam sebuah hubungan dan pengaruh timbal balik dengan daerah-daerah lainnya.

Selanjutnya menurut Soenardjo (dalam Nurcholis 2011:14) Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum berdasarkan adat dan hukum adat yang menetap dalam suatu wilayah yang tertentu batas-batasnya, memiliki ikatan lahir dan batin yang kuat, baik karena seketurunan maupun karena sama-sama memiliki kepentingan politik, ekonomi, sosial, dan keamanan, memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama, memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.

Sedangkan Nurcholis (2011:4) mengemukakan Desa adalah suatu wilayah yang didiami oleh sejumlah penduduk yang saling mengenal atas dasar hubungan kekerabatan dan/atau kepentingan politik, sosial, ekonomi, dan keamanan yang didalam pertumbuhannya menjadi kesatuan masyarakat hukum berdasarkan adat sehingga tercipta ikatan lahir batin antara masing-masing warganya, umumnya warganya hidup dari pertanian, mempunyai hak mengatur rumah tangga sendiri, dan secara administrative berada dibawah pemerintahan kabupaten/kota.

Lebih lanjut Maschab (dalam Wasistiono dan M. Irwan Tahir 2006:14) pengertian sosiologis desa digambarkan sebagai suatu bentuk kesatuan masyarakat atau komunitas penduduk yang bertempat tinggal dalam suatu lingkungan dimana mereka saling mengenal dan corak kehidupan mereka relative homogeny serta banyak bergantung dengan alam.

Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 1 ayat (1) tentang Desa menyebutkan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Pemerintahan Desa

Pemerintahan desa adalah perpanjangan pemerintah pusat serta memiliki peran yang strategis dalam pengaturan masyarakat desa/kelurahan.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan definisi pemerintahan desa sebagai berikut, pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Widjaja (2012:3) penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat.

Pemerintahan desa juga berarti penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah desa dan badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia

5. Kecamatan

Kecamatan adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia dibawah kabupaten atau kota. Kecamatan terdiri atas desa-desa atau kelurahan-kelurahan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kecamatan adalah daerah bagian kabupaten (kota) yang membawahkan beberapa kelurahan, dikepalai oleh seorang camat.

Penyelenggaraan pemerintahan kecamatan memerlukan adanya seseorang pemimpin yang selalu mampu menggerakkan bawahannya agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk berpartisipasi dalam kegiatan pemerintahan,

pembangunan dan kemasyarakatan secara berdayaguna. Produktivitas, penduduk makmur dan sejahtera secara merata (Budiman, 1995:4)

Sebuah Kecamatan selalu dipimpin oleh Camat, dan ada beberapa tugas Dalam PP Nomor 19 Tahun 2008 pasal 10 Tentang Kecamatan, pemerintah menetapkan beberapa tugas yang harus dipenuhi oleh Camat dalam memimpin Kecamatan, yaitu:

- a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum.
- b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi:
 1. partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/Kelurahan dan Kecamatan;
 2. sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;
 3. efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan dan
 4. pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada bupati/wali kota;
- c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, meliputi:
 1. sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan;

2. harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan
 3. pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada bupati/wali kota;
- d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, meliputi:
1. sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 2. pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada bupati/wali kota;
- e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, meliputi:
1. sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait;
 2. pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta; dan
 3. pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada bupati/wali kota;
- f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan, meliputi:
1. sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait;

2. efektivitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan; dan
 3. pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada bupati/wali kota;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa;
- h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan, meliputi:
1. perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
 2. fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
 3. efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan;
 4. pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan kepada bupati/wali kota melalui sekretaris daerah;
- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Salah satu poin dari tugas camat diatas yaitu pada huruf (g) yaitu: Camat bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pemerintahan desa sesuai dengan peraturan undang-undang yang mengatur desa.

6. Pembinaan

Pembinaan secara etimologi berasal dari kata bina. Pembinaan adalah proses, perbuatan, cara pembinaan, pembaharuan, usaha dan tindakan atau kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dengan baik.

Pembinaan menurut Masdar Helmi adalah segala usaha, ikhtiar dan kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan dan pengorganisasian serta pengendalian segala sesuatu secara teratur dan terarah

Sedangkan Menurut Mathis (2009:112), pembinaan adalah proses dimana orang-orang mencapai kemampuan tertentu untuk membantu mencapai tujuan organisasi. Oleh karena itu proses ini terkait dengan berbagai tujuan organisasi.

Kemudian menurut Ismail (2001:154), mendefinisikan pembinaan sebagai proses komunikasi dua arah yang menghubungkan pusat pengetahuan dengan penerima dan pekerja akhir (masyarakat) dan tujuan pembinaan adalah supaya masyarakat dapat meningkatkan taraf hidup menjadi lebih sejahtera dan sempurna.

Lebih lanjut Ismail menyatakan bahwa tata cara membina adalah:

1. Dengan menggunakan media masa baik dalam arti menggunakan media cetak maupun elektronik. Tujuannya agar teknik ini dapat menjangkau penerima sebanyak mungkin dengan biaya relatif rendah. Dengan menggunakan media cetak hendaklah disesuaikan dengan tingkat pendidikan yang menerima sehingga dapat dipahami oleh penerima, baik menafsir, menerjemahkan, maupun menganalisis.
2. Dengan melakukan kunjungan yaitu tata cara berkomunikasi dari satu orang ke orang lain dengan mengadakan kunjungan kerumah.

3. Dengan melakukan pertunjukan dan demonstrasi. Pertunjukan dan demonstrasi adalah suatu demonstrasi persembahan yang tersusun yang dilakukan oleh seorang instruktur tentang suatu hal yang dianggap penting berdasarkan prinsip-prinsip ilmu.
4. Ceramah merupakan kaedah membina yang penting dan populer yang tujuannya khusus memberikan penerangan.
5. Kursus. Merupakan metode pembinaan yang semakin penting sesuai dengan perencanaan yang dapat dilakukan baik formal maupun informal tujuan pembinaan kursus adalah untuk meningkatkan ilmu pengetahuan pada bidang-bidang tertentu dalam bidang pembangunan pedesaan, dan mempertinggi tingkat kematangan dan pendidikan.

Menurut Miftah Thoha (1993:81), Pembinaan dapat dilakukan dengan berbagai bentuk, ada empat indikator tentang, keempat indikator pembinaan tersebut yaitu;

1. Pemberian Bimbingan

Pemberian bimbingan adalah suatu usaha yang dilakukan oleh seorang pemimpin untuk mengajak, menggiring, menuntun, memotivasi, serta mendorong agar bawahan dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik serta dapat menjalankan segala aktivitas kegiatan sesuai dengan rencana.

2. Pemberian Pengarahan

Pengarahan adalah suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua yang diarahkan mencapai sasaran sesuai perencanaan dari yang memberikan pengarahan, artinya menggerakkan orang-orang agar mau bekerja dengan sendirinya atau penuh kesadaran secara bersama-sama yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan yang dikehendaki secara efektif dan efisien.

3. Memberikan Pendidikan

Pendidikan dimaksud adalah untuk membina kemampuan atau mengembangkan kemampuan dan pelatihan proses belajar mengajar yang menggunakan metode, jadi pendidikan merupakan suatu proses pembinaan, pengertian, pengetahuan, dan juga untuk menambahkan keterampilan.

4. Literatur Buku Petunjuk

Maksudnya ialah, pembinaan diberikan harus sesuai dengan peraturan yang tertulis sebagaimana mestinya agar mencapai tujuan yang dikehendaki.

7. Pelaksanaan

Pelaksanaan berasal dari kata laksana berarti sifat atau tanda. Ditambah awalan pe- dan akhiran -an yang membentuk kata benda menjadi pelaksanaan. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengemukakan batas mengenai pelaksanaan tersebut dengan lebih dahulu mengungkapkan pengertian pelaksanaan. Pelaksana adalah orang yang mengerjakan atau melakukan rencana yang telah disusun. Sedangkan pelaksanaan adalah perihal (perbuatan, usaha) melaksanakan rancangan. Berdasarkan batasan yang dikemukakan, maka jelas dapat dibedakan antara pengertian pelaksanaan adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaksana. Jadi dengan demikian pengertian diatas mempunyai arti yang berbeda namun berasal dari kata yang sama yaitu laksanakan.

Sedangkan menurut The Liang Gie (1997:191) pengertian pelaksanaan adalah sebagai berikut: Usaha-usaha yang dijalankan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijakan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi

segala kebetulan alat-alat yang diperlukan, dimana pelaksanaannya, kapan waktunya dimulai dan berakhir, dan bagaimana cara dilaksanakan.

Pelaksanaan juga diartikan sebagai suatu usaha atau kegiatan tertentu yang dilakukan untuk mewujudkan rencana atau program dalam kenyataannya, Santoso Sastropetro (1988:183). Pelaksanaan menempati posisi paling penting dalam menentukan keberhasilan suatu program untuk diwujudkan. Maka dalam proses kegiatannya Menurut Binturo (1990:199), perlu memperhatikan beberapa hal, antara lain:

1. Perlu ditentukan secara jelas siapa badan/lembaga yang secara fungsional akan disertai wewenang mengkoordinasi program dalam suatu sektor.
2. Perlu diperhatikan penyusunan program pelaksanaan yang jelas dan baik. Dalam program pelaksanaan itu, dasar prinsip fungsional perlu dituangkan kedalam rangkaian prosedur yang serasi, jelas dan ditaati oleh semua pihak yang terlibat dalam hubungan pelaksanaan program tersebut.
3. Perlu dikembangkan hubungan kerja yang lebih baik, antara lain dalam bentuk badan kerja sama atau suatu panitia kerja sama dengan tanggung jawab dan koordinasi yang jelas.
4. Perlu diusahakan koordinasi melalui proses penyusunan anggaran dan pelaksanaan pembiayaan.

Kemudian Menurut SP. Siagian (1987:120), menyatakan bahwa jika suatu rencana telah tersusun dan jika suatu program kerja yang “*achievement oriented*” telah dirumuskan maka kini hanya tinggal pelaksanaannya. Lebih lanjut Siagian

mengatakan bahwa dalam pelaksanaan ada beberapa hal pokok yang perlu diperhatikan, yaitu:

1. Membuat rencana detail, artinya mengubah rencana strategis (jangka panjang) menjadi rencana teknis (jangka pendek) dan mengorganisir sumber-sumber dan staf, selanjutnya menyusun peraturan-peraturan dan prosedur-prosedur tertentu.
2. Pemberian tugas, artinya merubah rencana teknis menjadi rencana praktis, dan tujuan selanjutnya melakukan pembagian tugas-tugas dan sumber-sumber.
3. Monitor, artinya pelaksanaan dan kemajuan pelaksanaan tugas jangan sampai terjadi hal-hal yang berhubungan dengan rencana praktis. Dalam hal ini diperlukan untuk memeriksa hasil-hasil yang dicapai.
4. Review, artinya pelaporan hasil-hasil rencana kegiatan, analisis pelaksanaan tugas-tugas, pemeriksaan kembali dan penyusunan ulang jadwal waktu pelaksanaan, selanjutnya dalam laporan dihadapkan adanya saran dan perbaikan bila ditemui penyimpangan.

Dari rumusan diatas, dapat dirangkum bahwa pelaksanaan itu adalah suatu kegiatan dalam proses merealisasikan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga tujuan dapat tercapai dengan memperhatikan kesesuaian, kepentingan dan kemampuan suatu kelompok sasaran. Dengan demikian, pelaksanaan sebagai suatu kegiatan merealisasikan tujuan terhadap sebuah sasaran sehingga suatu pelaksanaan akan mengarah kepada usaha yang sesuai dengan kepentingan masyarakat.

B. Penelitian Terdahulu

Tabel II.I Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Jenis Penelitian	Hasil
1	2	3	4	5
1	Ghifari M Farisi	Implementasi Tugas dan Wewenang Camat dalam Mengkoordinasikan Pemerintahan Kelurahan di Kecamatan Umbulharjo menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah	Metode penelitian kualitatif	Kualitas dan kuantitas sumber daya pegawai yang belum sesuai dengan beban tugas, sehingga berdampak pada kualitas pekerjaan yang kurang maksimal.
2	Ratna Meutia	Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Camat dalam Membina Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berdasarkan PP Nomor 19 Tahun 2008 di Kecamatan Kuala Kabupaten Bireuen	Metode pendekatan kualitatif	Sudah terlaksananya tugas dan wewenang camat dalam membina penyelenggaraan pemerintahan desa dengan baik, hanya mengalami beberapa hambatan seperti terbatasnya sarana prasarana namun bersifat tidak terlalu sulit dan dapat diawasi.
3	Hardi Sapitri	Tugas Camat dalam Membina dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di kecamatan Lingga Kabupaten Lingga	Metode Kualitatif	Camat Lingga telah melaksanakan kegiatannya dengan baik, namun belum optimal karena tugas dan tanggungjawab camat yang terlalu banyak sehingga sulit memberikan pembinaan dan pengawasan

				terhadap pemerintah desa diwilayahnya.
--	--	--	--	--

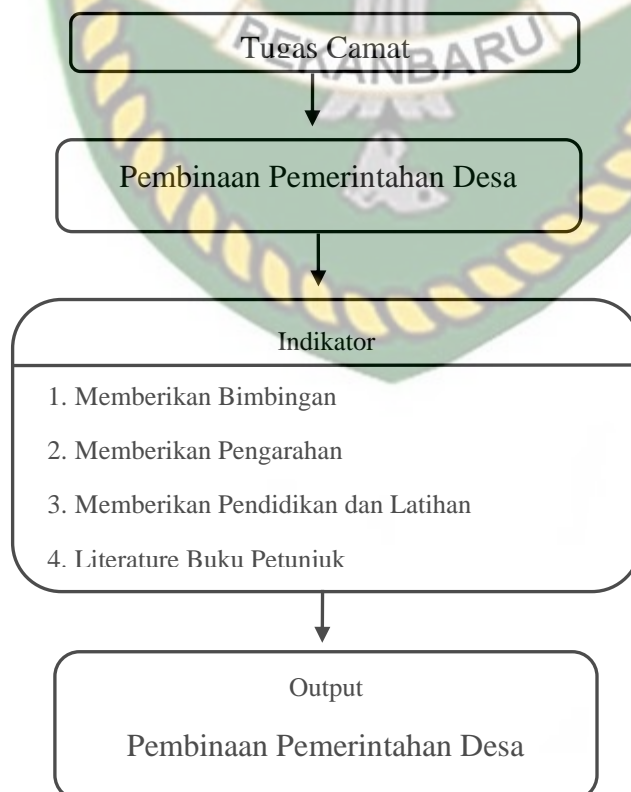
Sumber : Olahan Peneliti, 2020

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa penelitian mengenai Tugas Camat dalam Membina Pemerintahan Desa relatif baru, khususnya Kabupaten Siak. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan lebih kepada Pelaksanaan Tugas Camat dalam Membina Pemerintahan Desa itu sendiri.

C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah diagram yang menjelaskan secara garis besar alur logika berjalannya suatu penelitian, berdasarkan teori yang telah diuraikan dslam studi kepustakaan, maka penlulis membuat suatu kerangka pikiran dari penelitian ini, sebagai berikut:

Gambar II.I : Kerangka Pikir Tentang Pelaksanaan Tugas Camat dalam Membina Pemerintahan Desa di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak



Sumber : Olahan Peneliti, 2020

D. Proposisi

Berdasarkan kerangka pikir yang sudah ada dibangun pada penelitian ini, maka peneliti mengajukan proposisi penelitian sebagai berikut: Pelaksanaan Tugas Camat dalam Membina Pemerintahan Desa Terjalin dalam bentuk Membuat Rencana Detail, Pemberian Tugas, Monitor, dan Review.

E. Konsep Operasional

Untuk memudahkan suatu pemahaman penelitian ini, maka penulis memberikan beberapa batasan penelitian dan fokus penelitian ini yang dioperasikan melalui beberapa indikator sebagai berikut:

1. Desa dalam penelitian ini adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa dalam penelitian ini adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia.
3. Pembinaan, pembinaan adalah proses, perbuatan, cara pembinaan, pembaharuan, usaha dan tindakan atau kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dengan baik. Adapun empat indikator pembinaan yaitu, melakukan pembimbingan, melakukan pengarahan, memberikan pendidikan, dan literatur buku petunjuk.

4. Kecamatan adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia dibawah kabupaten atau kota. Kecamatan terdiri atas desa-desa atau kelurahan-kelurahan. Kecamatan juga merupakan daerah bagian kabupaten (kota) yang membawahkan beberapa kelurahan, dikepalai oleh seorang camat.
5. Pelaksanaan adalah perihal (perbuatan, usaha) melaksanakan rancangan. Pelaksanaan adalah Usaha-usaha yang dijalankan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijakan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebetulan alat-alat yang diperlukan, dimana pelaksanaannya, kapan waktunya dimulai dan berakhir, dan bagaimana cara dilaksanakan.

F. Operasional Variabel

Tabel II.II Operasional Variabel Penelitian Tentang Pelaksanaan Tugas Camat dalam Membina Pemerintahan Desa di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak

Konsep	Variabel	Indikator	Output
1	2	3	4
Pembinaan adalah, segala usaha, ikhtiar dan kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan dan pengorganisasian serta pengendalian segala sesuatu secara teratur dan terarah.	Pembinaan Pemerintahan Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan Bimbingan 2. Memberikan pengarah 3. Memberikan Pendidikan dan Latihan 4. Literature Buku Petunjuk 	Pelaksanaan Pemerintahan Desa

BAB III METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Metode penelitian diartikan sebagai suatu cara yang digunakan dalam penelitian untuk mendapatkan data atau keterangan, mengklarifikasi, kemudian menganalisa data dan keterangan tersebut guna mencari jawaban atas permasalahan penelitian ini.

Dalam memudahkan penulis dalam mengumpulkan data yang diperlukan maka penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Dalam buku Sugiono (2016:9) mengemukakan bahwa metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dan generalisasi.

Metode penelitian kualitatif sering disebut dengan metode penelitian naturalistic, karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting). Filsafat postpositivisme disebut sebagai paradigma interpretif, konstruktif, yang memandang realitas sosial sebagai sesuatu yang utuh, kompleks dan penuh makna, dan hubungan gejala bersifat interaktif. Penelitian dilakukan pada objek yang alamiah.

Moelong Lexy (2007:6) menyebutkan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistic dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan serbagai metode ilmiah.

B. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian penulis memilih lokasi Di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak. Adapun alasan penulis memilih lokasi tersebut adalah karena dari 7 desa yang berada di Kecamatan Tualang, desa Pinang Sebatanglah yang tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanannya lebih rendah dari desa-desa lainnya. Adanya keluhan-keluhan dari masyarakat inilah yang membuat penulis ingin melihat lebih dekat dan nyata mengenai Pelaksanaan Tugas Camat dalam Membina Pemerintahan Desa.

C. Informan dan Key Informan

Informan penelitian adalah orang-orang yang dapat memberikan informasi. Informan penelitian adalah sesuatu baik orang, benda maupun lembaga (organisasi) yang sifat dan keadaannya diteliti (Sukandarrumidi, 2002:65)

Key informan atau informan kunci adalah mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian (Suyanto, 2005:171). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan informan dan key informan sebagai orang yang memberikan informasi tentang Pelaksanaan Tugas Camat dalam Membina Pemerintahan Desa di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.

Tabel III.I Rincian jumlah Informan dan Key Informan Pelaksanaan Tugas Camat dalam SiakMembina Pemerintahan Desa di Kecamatan Tualang Kabupaten

NO	INFORMAN	KETERANGAN
1	Sekretaris Camat	Key Informan
2	Kepala Desa	Informan
3	Sekretaris Desa	Informan
4	Kasi	Informan
5	Kaur	Informan

6	Masyarakat	Informan
7	Masyarakat	Informan

D. Teknik Penarikan informan

Dalam wawancara yang dilakukan dengan informan, peneliti menggunakan metode *purposive sampling*, metode ini adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu yang dimaksud seperti orang yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan penelitian menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti (Sugiyono 2012:54).

Untuk mencari jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini penulis menggunakan informan/responden yang bertindak sebagai sumber data dan informan terpilih serta yang bersangkutan dengan penelitian ini.

E. Jenis dan Sumber Data

Untuk mendapatkan data dan informan yang baik penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut;

1. Data Primer

Data berupa kata-kata dan tindakan (informan) serta peristiwa-peristiwa tertentu yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan penelitian, dan merupakan hasil pengumpulan peneliti sendiri selama berada dilokasi penelitian. Data premier merupakan data yang diperoleh secara langsung dari responden penelitian, baik wawancara maupun dokumentasi serta catatan lapangan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti yaitu mengenai pola hubungan Pelaksanaan Tugas Camat dalam Membina dengan Pemerintahan Desa.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang pernah ada. Adapun data-data dokumentasi yaitu

F. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sudaryono (2018:205) teknik pengumpulan data merupakan suatu hal yang penting dalam penelitian, karena metode ini merupakan strategi atau cara yang diperlukan dalam penelitiannya. Untuk memperoleh data pada penelitian ini penulis menggunakan beberapa cara sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan. Apabila objek penelitian bersifat perilaku, tindakan manusia, dan fenomena alam, proses kerja, dan penggunaan responden kecil. Observasi atau pengamatan merupakan suatu teknik atau cara pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Wawancara ini digunakan bila ingin mengetahui hal-hal mengenai responden secara lebih mendalam serta jumlah responden sedikit. Wawancara dilakukan secara lisan dalam pertemuan tatap muka secara individual atau kelompok. Dengan penyusunan daftar pernyataan sesuai dengan data dan informasi yang diperlukan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah untuk ditujukan memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter, dan data yang relevan dari penelitian. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sedang berlaku, dokumen juga bisa berbentuk tulisan, dan gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Dalam hal ini peneliti memperoleh data langsung dari tempat penelitian berupa foto dokumentasi.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan langkah-langkah model interaktif Miles dan Huberman. Analisis interaktif ini merupakan siklus dan interaktif. Artinya peneliti dalam melakukan penelitian bergerak pada empat sumbu yaitu proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan kesimpulan atau verifikasi. Proses ini bersifat berulang dan berlanjut sehingga selesai (dalam Sugiono 2012:91). Adapun penjelasan lebih lanjut mengenai 4 proses analisis data tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan Data merupakan bagian integral dari kegiatan analisis data. Kegiatan pengumpulan data pada penelitian ini dengan menggunakan observasi dan wawancara.

2. Reduksi Data

Reduksi data adalah sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan dan informasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis

dilapangan. Reduksi dilakukan sejak pengumpulan data dengan membuat ringkasan, mengkode, dan menelusur tema.

3. Display atau Penyajian Data

Display atau penyajian data adalah pendeskripsian sekumpulan informan terusan yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk teks naratif. Penyajian juga dapat berbentuk matrik, diagram, tabel dan bagan.

4. Verifikasi dan Penegasan Kesimpulan

Verifikasi dan penegasan kesimpulan merupakan kegiatan akhir dari analisis data, penarikan kesimpulan berupa kegiatan interpretasi, yaitu menemukan makna data yang telah disajikan. Antara display data dan penarikan kesimpulan terdapat aktivitas analisis data yang ada. Dalam pengertian ini analisis data kualitatif merupakan upaya berlanjut, berulang dan terus-menerus. Masalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi menjadi gambaran keberhasilan secara berurutan sebagai rangkaian kegiatan analisis yang terkait. Selanjutnya data yang telah dianalisis, dijelaskan dan dimaknai dalam bentuk kata-kata untuk mendeskripsikan fakta yang ada dilapangan, pemaknaan atau untuk menjawab pertanyaan penelitian yang kemudian diambil inti sarinya.

Berdasarkan keterangan diatas, maka setiap tahap dalam proses tersebut dilakukan untuk mendapatkan keabsahan data dengan menelaah seluruh data yang ada dari berbagai sumber yang telah didapat dari lapangan dan dokumentasi pribadi, dokumen resmi, gambar, foto dan sebagainya melalui metode wawancara yang didukung dengan stufi dokumentasi.

H. Unit Analisis Penelitian

Unit analisis merupakan sesuatu yang berkaitan dengan fokus yang diteliti. Unit analisis merupakan suatu penelitian yang dapat berupa benda, individu, kelompok, wilayah dan waktu tertentu sesuai dengan fokus penelitiannya. Pada penelitian kualitatif pada dasarnya analisis data menggunakan pikiran logis, analisis dengan logika, dengan induksi, deduksi, analogi, komparasi, dan sejenisnya (dalam Suprayogo dan Tobroni 2001:48)

Dalam penelitian ini analisisnya berupa Pelaksanaan Tugas Camat dalam Membina Pemerintahan Desa oleh Camat di Kecamatan Tualang. Dalam penelitian ini penulis menulis semua data yang berhasil dikumpulkan selama proses penelitian dilakukan, dan penulisan diuraikan dalam bentuk tulisan, kemudian direduksi, dirangkum dan dipilih hal-hal pokok untuk penelitian. Setelah semua data sudah dipilih, selanjutnya peneliti berusaha mengambil kesimpulan dari proses tersebut. Tetapi kesimpulan yang ada masih diverifikasi secara terus-menerus selama penelitian berlangsung.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Kondisi Umum Kabupaten Siak

1. Luas dan Batas Wilayah

Kabupaten Siak secara geografis memiliki luas 8.556,09 Km² atau 9,74% dari total luas wilayah Provinsi Riau, merupakan wilayah terluas ke-6 Kabupaten/kota Provinsi Riau dengan pusat administrasi di Kota Siak Sri Indrapura. Wilayah Kabupaten Sampai 2020 memiliki 14 Kecamatan yang terdiri dari 9 kelurahan, 114 kampung dan 8 kampung adat.

Ada 14 Kecamatan yang berada di dalam kawasan Kabupaten Siak, yaitu:

1. Kecamatan Bunga Raya
2. Kecamatan Dayun
3. Kecamatan Kandis
4. Kecamatan Kerinci Kanan
5. Kecamatan Koto Gasip
6. Kecamatan Lubuk Dalam
7. Kecamatan Mempura
8. Kecamatan Minas
9. Kecamatan Pusako
10. Kecamatan Sabak Auh
11. Kecamatan Siak
12. Kecamatan Sungai Apit
13. Kecamatan Sungai Mandau
14. Kecamatan Tualang

Secara Administratif batas wilayah Kabupaten Siak adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Kepulauan Meranti;
- b. Sebelah Selatan : Kabupaten Kampar, Kabupaten Pelalawan dan Kota Pekanbaru;
- c. Sebelah Timur : Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Kepulauan Meranti;

- d. Sebelah Barat : Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Kampar dan Kota Pekanbaru.

2. Letak dan Kondisi Geografis

Secara Geografis Kabupaten Siak terletak diantara 1 16'30"LU-0 20'49"LU dan 10054'21"BT-102 14'59"BT, yang sebagian besarnya terdiri dari dataran rendah dibagian timur dan sebagian dataran tinggi di sebelah barat. Morfologi wilayah Kabupaten Siak sebagian besar terdiri dari dataran dan sebagian kecil dari perbukitan yang terletak dibagian barat daya. Morfologi dataran mencakup sekitar 60% Wilayah Kabupaten Siak. Morfologi perbukitan rendah terdapat dibagian utara, timur dan memanjang dari arah barat laut sampai tenggara.

3. Topografi

Kabupaten Siak terdiri dari satuan dataran rendah dan satuan perbukitan. Kabupaten Siak terdiri dari dataran rendah dengan ketinggian 0-50 meter dari permukaan laut, meliputi dataran sungai dan rawa serta terbentuk endapan permukaan. Kemiringan lereng sekitar 0-3 atau bisa dikatakan hampir datar. Sedangkan satuan perbukitan mempunyai ketinggian antara 50-150meter dari daerah sekitarnya dengan kemiringan 3-15.

4. Geologi

Wilayah Kabupaten Siak merupakan bagian dari daerah yang tersusun dari batuan sedimen tufa yang berombak sampai bergelombang. Batuan induk didominasi oleh batuan lempung, silica, batu pasir dan batu lapis. Formasi ini terdapat di daerah minas.

5. Klimatologi

Berdasarkan letak astronomis, seluruh wilayah Kabupaten Siak bila dilihat dari iklim matahari, seluruhnya terletak di daerah tropis, sehingga iklim yang berlaku didaerah

ini juga iklim tropis dengan suhu udara berkisar antara 25 C sampai dengan 32 C dan kelembaban udara 88,9% perbulan.

B. Sejarah Kabupaten Siak

Kerajaan Siak Sri Indrapura didirikan pada tahun 1723 M oleh Raja Kecil yang bergelar Sultan Abdul Jalil Rahmat Syah putera Raja Johor (Sultan Mahmud Syah) dengan istrinya Encik Pong, dengan pusat kerajaan di Buantan. Konon nama Siak berasal dari nama sejenis tumbuh-tumbuhan yaitu siak-siak yang banyak terdapat disitu.

Sebelum kerajaan Siak berdiri, daerah Siak berada dibawah kekuasaan Johor. Yang memerintah dan mengawasi daerah ini adalah raja yang ditunjuk dan diangkat oleh Sultan Johor. Namun hampir 100 tahun daerah ini tidak ada yang memerintah. Daerah ini diawasi oleh Syahbandar yang ditunjuk untuk memungut cukai hasil hutan dan hasil laut.

Pada awal tahun 1699 Sultan kerajaan Johor bergelar Sultan Mahmud Syah II mangkat dibunuh Magat Sri Rama, istrinya yang bernama Encik Pong pada waktu itu hamil dilarikan ke Singapura, kemudian ke Jambi. Dalam perjalanan itu lahirlah Raja Kecil dan kemudian di besarkan di kerajaan Pagaruyung Minangkabau. Sementara itu pucuk kepemimpinan Kerajaan Johor diduduki oleh Datuk Bendahara tun Habib yang bergelar Sultan Abdul Jalil Riayat Syah.

Setelah Raja Kecil dewasa, pada tahun 1717 Raja Kecil berhasil merebut tahta Johor. Tetapi tahun 1722 Kerajaan Johor tersebut direbut kembali oleh tengku Sulaiman ipar Raja Kecil yang merupakan putra Sultan Abdul Jalil Riayat Syah. Dalam merebut Kerajaan Johor ini, Tengku Sulaiman dibantu oleh beberapa bangsawan Bugis. Terjadilah

perang saudara yang mengakibatkan kerugian yang cukup besar pada kedua belah pihak, maka akhirnya masing-masing pihak mengundurkan diri ke Pahang, dan Raja Kecil mengundurkan diri ke Bintan dan seterusnya mendirikan negeri baru dipinggir Sungai Buatan (anak sungai Siak) namun pusat kerajaan Siak tidak menetap di Buatan.

Pusat kerajaan kemudian selalu berpindah-pindah dari kota Buatan pindah ke Mempura, kemudian pindah ke Senapelan Pekanbaru dan kembali lagi ke Mempura. Semasa pemerintahan Sultan Ismail dengan Sultan Assyaidis Syarif Ismail Jalil Jalaluddin (1827-1864) pusat kerajaan Siak dipindahkan ke Kota Siak Sri Indrapura dan akhirnya menetap disana sampai masa pemerintahan Sultan Siak terakhir.

Pada masa Sultan ke-11 yaitu Sultan Assyaidis Syarif Hasyim Abdul Jalil Syaiffudin yang memerintah pada tahun 1889-1908, dibangunlah istana yang megah terletak dikota Siak dan istana ini diberi nama istana Asseraiyah Hasyimiah yang dibangun pada tahun 1889. Pada masa pemerintahan Sultan Syarif Hasyim ini Siak mengalami kemajuan terutama dibidang ekonomi. Dan masa itu pula beliau berkesempatan melawat ke Eropa yaitu Jerman dan Belanda.

Setelah wafat beliau digantikan oleh putranya yang masih kecil dan sedang bersekolah di Batavia yaitu Tengku Sulung Syarif Kasim dan baru pada tahun 1915 beliau ditabalkan sebagai Sultan Siak ke-21 dengan gelar Assyaidis Syarif Kasim Abdul Jalil Syaifuddin dan terakhir terkenal dengan nama Sultan Syarif Kasim Tsani (Sultan Syarif Kasim II). Bersamaan dengan diproklamirkannya Kemerdekaan Republik Indonesia, beliau pun mengibarkan bendera merah putih di Istana Siak dan tak lama kemudian beliau berangkat ke Jawa menemui Bung Karno dan menyatakan bergabung dengan Republik

Indonesia dengan menyerahkan Mahkota Kerajaan serta uang sebesar Sepuluh Ribu Gulden. Dan sejak saat itu beliau meninggalkan Siak dan bermukim di Jakarta. Baru pada tahun 1960 kembali ke Siak dan mangkat di Rumbai pada tahun 1968.

Beliau tidak meninggalkan keturunan baik dari Permaisuri Pertama Tengku Agung maupun Permaisuri Kedua Tengku Maharatu. Pada tahun 1997 Sultan Syarif Kasim II mendapat gelar Kehormatan Kepahlawanan sebagai seorang Pahlawan Nasional Republik Indonesia. Makam Sultan Syarif Kasim II terletak di tengah Kota Siak Sri Indrapura, tepatnya disamping Mesjid Sultan yaitu Mesjid Syahabuddin.

Diawal Pemerintahan Republik Indonesia, Kabupaten Siak ini merupakan Wilayah Kewedanan Siak dibawah Kabupaten Bengkalis yang kemudian berubah status menjadi Kecamatan Siak. Barulah pada tahun 1999 berubah menjadi Kabupaten Siak dengan Ibu kotanya Siak Sri Indrapura berdasarkan UU No. 53 Tahun 1999.

C. Kondisi Umum Kecamatan Tualang

1. Letak Geografis Kecamatan Tualang

Kabupaten Siak mempunyai beraneka macam bentuk ekosistem daratan dan perairan seperti hutan, rawa, sungai dan danau. Sebagian besar daratan berbentuk dataran rendah dan rawa gambut. Karena terletak di daerah katulistiwa maka kabupaten Siak mempunyai iklim tropis dengan suhu udara 25-32 C.

Luas Wilayah Kecamatan Tualang terletak antara 0°32'-0°51'Lintang Utara 101°28'-101°52' Bujur Timur dengan Luas keseluruhan Kecamatan Tualang yaitu 373,75 KM2. Kecamatan Tualang terdiri dari 8 (delapan) desa dan 1 (satu) kelurahan, sedangkan

jarak desa paling jauh dari pusat pemerintahan Kecamatan hanya kurang lebih 15KM dan hanya 2 (dua) desa saja yaitu desa Maredan dan Desa Tualang Timur. Kecamatan Tualang terdiri dari perbukitan dan sebagian kecil daerah perairan yang dihuni suku asli Riau.

Berikut wilayah lain yang berbatasan langsung dengan Kecamatan tualang, yaitu:

- a. Utara : Kecamatan Minas
- b. Selatan : Kecamatan Kerinci Kanan dan Lubuk Dalam
- c. Barat : Kecamatan Minas dan Kota Pekanbaru
- d. Timur : Kecamatan Koto Gasip dan Lubuk Dalam

Pusat pemerintahan di Kelurahan Perawang berjarak \pm 70KM dari Siak Sri Indrapura, dapat ditempuh melalui jalur sungai selama \pm 1,5 jam dan melalui jalur darat \pm 1,5 - 2 jam perjalanan dan pada tanggal 21 Februari 2011 telah diresmikan Jembatan Maredan yang menghubungkan Perawang dengan Siak.

Wilayah Kecamatan Tualang seperti pada umumnya wilayah Kabupaten Siak lainnya terdiri dari dataran rendah dengan struktur tanah pada umumnya merupakan tanah podsolik merah kuning dari batuan dan aluvial serta tanah organosol dan gley humus dalam bentuk tanah rawa-rawa atau tanah basah. Kecamatan Tualang secara umum berada pada daerah dataran dimana sektor industri pengolahan merupakan penggerak perekonomian yang sangat dominan tidak saja bagi Kecamatan Tualang sendiri tapi juga menjadi sektor andalan Kabupaten Siak. Sehingga perawang sering disebut juga sebagai daerah industri.

Masyarakat Perawang sebagian besar adalah pendatang dari bermacam suku dan agama. Perawang dulunya hanya sebuah desa kecil yang terisolir dari segi ekonomi maupun akses jalan. Setelah masuknya perusahaan besar seperti CALTEX, IKPP sangat

membantu pertumbuhan makro desa Perawang. Hingga saat ini pertumbuhan Perawang dikatakan stabil, ditandai dengan banyaknya pembangunan yang semakin merata.

Dikota ini terdapat pabrik kertas PT. Indah Kiat yang merupakan anak grup Sinarmas. Indah Kiat merupakan pabrik kertas dan bubur kertas utama di Indonesia. Pabrik ini telah memberikan manfaat ekonomi untuk masyarakat Perawang dan sekitarnya, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Namun kerusakan lingkungan penebangan kayu hutan yang menjadi bahan baku pabrik menjadi sisi lain dari dampak keberadaannya. Di samping itu, pabrik ini kerap dituding sebagai salah satu penyebab tercemarnya aliran sungai Siak.

Sesuai dengan keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: 70/Kpts-II/95 tentang pengaturan tata ruang hutan tanaman industri, Masyarakat seputar hutan dikabupaten Siak umumnya dan Kecamatan Tualang khususnya berhak mendapat 5% luas HTI yang ada di Kecamatan Tualang. Dengan diberikannya hak tersebut akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat seputar hutan yang selama ini terpinggirkan.

2. Jumlah Penduduk, Mata Pencaharian, Tingkat Pendidikan dan Sarana Prasarana

1. Jumlah Penduduk

Kondisi umum Kecamatan Tualang berikut ini akan dipaparkan mengenai jumlah penduduk, mata pencaharian, tingkat pendidikan, sarana prasarana.

Tabel IV.I Jumlah penduduk Kecamatan Tualang

No.	Jenis Kelamin	Jumlah/Jiwa
1.	Laki-laki	60.422

2.	Perempuan	54.466
	Jumlah	114.888

Sumber: Kantor Camat Tualang, 2020

Dari tabel diatas dapat terlihat bahwa Kecamatan Tualang didominasi oleh penduduk laki-laki. Potensi yang menonjol di Kecamatan Tualang adalah Perdagangan, Perkebunan dan Buruh

2. Mata Pencaharian

Masyarakat Kecamatan Tualang sebagian besar bekerja sebagai Buruh, Pedagang, Petani, PNS dan Peternak. Sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel IV.II Mata Pencaharian Masyarakat Kecamatan Tualang

No.	Mata Pencaharian	Jumlah Penduduk
1	Buruh	19.052
2	Pengusaha/Pedagang	4.577
3	Petani	731
4	Pegawai Negeri Sipil	2.622
5	Peternak	668
		27.650

Sumber: Kantor Camat Tualang, 2020

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa di Kecamatan Tualang Mata Pencaharian masyarakat terbesar adalah menjadi buruh, ini terjadi karena terdapat Pabrik kertas di Kecamatan ini yaitu PT. Indah Kiat

3. Tingkat Pendidikan

Masyarakat Kecamatan Tualang memiliki tingkat pendidikan yang heterogen (campuran). Hal ini menyebabkan tingkat analisis masyarakat terhadap sistem pemerintahan juga berbeda

Tabel IV.III Tingkat Pendidikan Penduduk Kecamatan Tualang

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	TK	1.805
2	SD/Sederajat	6.234
3	SMP/Sederajat	3.041
4	SMA/Sederajat	3.876
5	Diploma I/II	167
6	Diploma III/Akademi	468
7	Strata I	722
8	Strata II	145
9	Strata III	22
		16.480

Sumber: Kantor Camat Tualang, 2020

Dari tabel diatas dijelaskan bahwa tingkat pendidikan penduduk Kecamatan Tualang terbanyak tingkat pendidikan SD/Sederajat yaitu sebanyak 6.234 orang dan tingkat pendidikan Strata III hanya sebanyak 22 orang.

4. Sarana dan Prasarana

Selanjutnya akan dipaparkan sarana dan prasarana yang ada di Kecamatan Tualang sebagai berikut:

Tabel IV.IV Sarana dan Prasarana Kecamatan Tualang

No.	Sarana/Prasarana	Jumlah	Keterangan
1	Kantor desa/kepenghuluan	9	Layak pakai
2	Bank	6	Layak pakai
3	Kantor koperasi	13	Layak pakai
4	Sekolah	151	Layak pakai
5	Puskesmas	2	Layak pakai
6	Posyandu	17	Layak pakai
7	Masjid	87	Layak pakai
8	Musholla	59	Layak pakai
9	Gereja	33	Layak pakai
10	Kuil/pura	2	Layak pakai
11	Pasar umum	7	Layak pakai
		386	Layak pakai

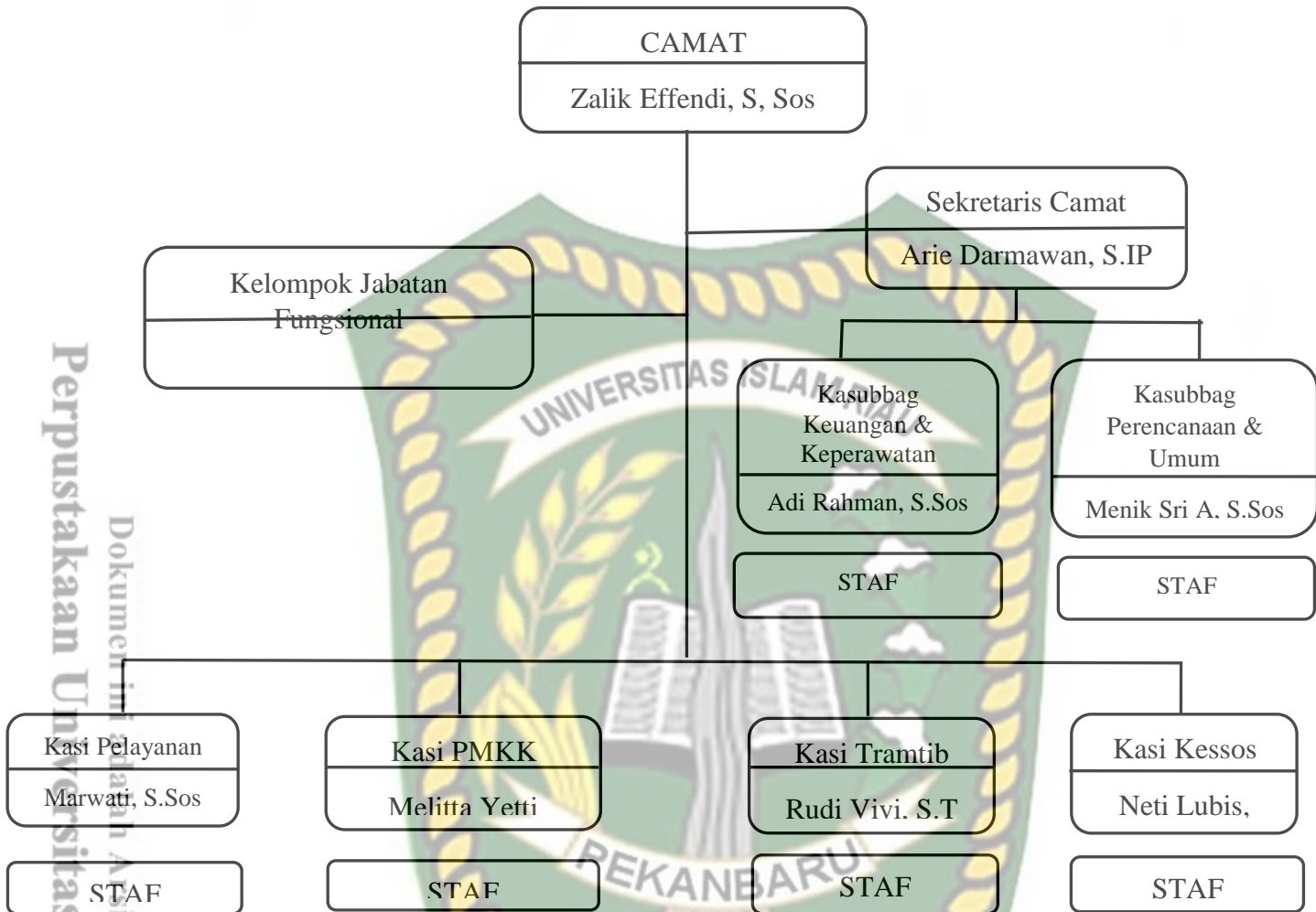
Sumber: Kantor Camat Tualang, 2020

Dari tabel diatas dijelaskan bahwa semua sarana dan prasarana yang ada di Kecamatan Tualang dapat dikatakan memadai dan layak pakai.

3. Struktur Organisasi Kantor Camat Tualang

Struktur organisasi Kantor Camat Tualang adalah sebagai berikut:

Gambar IV.I Struktur Organisasi Kantor Camat Tualang



BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis akan mengemukakan hasil penelitian yang telah penulis lakukan di lapangan terkait bagaimana Pelaksanaan Tugas Camat dalam Membina Pemerintahan Desa.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan melalui wawancara sehingga diperoleh data mengenai identitas informan berdasarkan jenis kelamin, usia, jenjang pendidikan dan jenis pekerjaan para responden. Selain itu diperoleh juga data-data primer maupun sekunder yang berkaitan dengan Pelaksanaan Tugas Camat dalam Membina Pemerintahan Desa.

A. Identitas Informan

Penelitian yang telah dilakukan ini merupakan penelitian mengenai Pelaksanaan Tugas Camat dalam Membina Pemerintahan Desa, dengan demikian untuk memperoleh data yang selanjutnya akan dianalisa sebagai bahan informasi maka perlu mencari data yang akurat dari informan yang mengetahui tentang pelaksanaan tersebut.

Dalam rangka menentukan hasil penelitian yang sangat berperan penting adalah informan, karena sebagian besar data yang diperoleh dalam penelitian ini berasal dari informan. Sehubungan dengan penelitian Pelaksanaan Tugas Camat dalam Membina Pemerintahan Desa.

Informan dalam penelitian yang telah dilakukan ini terdiri dari Camat Tualang, Sekretaris Camat, Kepala Desa, dan Masyarakat. Dengan wawancara tersebut diperoleh data mengenai Pelaksanaan Tugas Camat dalam Membina Pemerintahan Desa.

1. Jenis Kelamin

Jenis kelamin merupakan unsur genetika, dari para informan penulis membedakan antara jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Jenis kelamin juga dapat membedakan tingkat emosional informan. Untuk lebih jelas mengenai identitas jenis kelamin informan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel V.I Klasifikasi Jenis Kelamin Informan

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1.	Laki-laki	3	75%
2.	Perempuan	1	25%
	Jumlah	4	100%

Sumber : Hasil Penelitian, 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa sebagian responden penelitian didominasi oleh jenis kelamin laki-laki yang berjumlah 3 orang atau 75% sedangkan untuk responden yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 1 orang atau 25%

Dalam penelitian ini jenis kelamin informan tidak berpengaruh terhadap hasil penelitian yang dilakukan selama informan tersebut bersedia untuk memberikan jawaban yang memang benar apa adanya. Tidak berpengaruhnya jenis kelamin informan terhadap hasil penelitian dikarenakan, bahwa jenis kelamin tidak menentukan pola fikir maupun pemahaman seseorang terhadap suatu permasalahan penelitian.

2. Usia Informan

Dalam sebuah penelitian tentunya tidak memberikan batasan usia terhadap informan. Namun kita tidak bisa pungkiri bahwa usia merupakan salah satu yang cenderung membentuk kedewasaan pola pikir manusia. Walaupun kedewasaan pola pikir tidaklah sepenuhnya bisa ditentukan oleh usia seseorang itu, namun pada kenyataannya pola pikir seseorang tergantung pada usianya.

Adapun tingkat usia informan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Tabel V.II Klasifikasi Informan Berdasarkan Usia

No.	Tingkat Usia	Jumlah	Persentase
1.	20-32	0	0%
2.	33-44	3	75%
3.	45-56	1	25%
	Jumlah	4	100%

Sumber : Hasil Penelitian, 2021

Berdasarkan tabel diatas diketahui identitas informan berdasarkan usia dari 4 (empat) orang yang dijadikan informan ada 0 (nol) orang atau tidak ada yang berumur 20-32 tahun, sebanyak 3 (tiga) orang berumur 33-44, dan 1 (satu) orang berumur 43-56 tahun.

3. Pendidikan Informan

Pendidikan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi jawaban yang diberikan oleh informan, semakin tinggi pendidikan informan maka semakin baik pula jawaban dan juga penjelasan yang diberikan terhadap rangkaian pertanyaan yang diajukan oleh peneliti dalam wawancara yang telah dilakukan, dari hasil penelitian tentang Pelaksanaan Tugas Camat dalam Membina Pemerintahan Desa maka dapat diketahui

bahwa tingkat pendidikan para informan yang masuk kedalam ruang lingkup penelitian ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel V.3 : Klasifikasi Informan Berdasarkan Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1.	SMA/SLTA	2	50%
2.	Strata Satu (S1)	1	25%
3.	Strata Dua (S2)	1	25%
		4	100%

Sumber: Hasil Penelitian, 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan informan dari 4 (empat) orang yang dijadikan informan sebanyak 2 (dua) orang berpendidikan SMA/Sederajat, 1 (satu) orang berpendidikan S1, dan 1 (satu) orang berpendidikan S2.

4. Pekerjaan Informan

Untuk informasi mengenai data pekerjaan, penulis menanyakan pertanyaan ini kepada masyarakat yang ada dilingkungan Desa Pinang Sebatang. Sehingga klasifikasi informan pekerjaan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel V.4 : Klasifikasi Informan Berdasarkan Jenis Pekerjaan

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah	Presentase
1.	PNS	2	50%
2.	Wirausaha	2	50%
		4	100%

Sumber: Hasil Penelitian, 2021

Berdasarkan tabel V.4 dapat diketahui pekerjaan informan berdasarkan jenis pekerjaannya dari 4 (empat) orang yang dijadikan informan sebanyak 2 (dua) orang bekerja sebagai wirausaha dan sebanyak 2 (dua) orang bekerja sebagai PNS.

B. Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Membina Pemerintahan Desa

Dalam bab ini, diuraikan hasil penelitian tentang Pelaksanaan Tugas Camat dalam Membina Pemerintahan Desa. Peneliti mendapatkan data dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Wawancara yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan mewawancarai Camat, Sekretaris Camat, Kepala Desa dan Masyarakat Desa Pinang Sebatang.

Pada penelitian ini, sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, data yang didapat berasal dari wawancara yang telah dipilih sesuai dengan kriteria penelitian yang dianggap bisa mewakili dari pada judul penelitian yang diangkat. Narasumber yang dipilih adalah orang yang mengetahui tentang Pelaksanaan Tugas Camat dalam Membina Pemerintahan Desa dimana terdapat 1 (satu) Key Informan dan 4 (empat) orang informan.

Hasil observasi dan wawancara merupakan data primer dalam penelitian ini, kemudian data sekunder dari penelitian ini diperoleh dari dokumentasi yang terdapat pada Kantor Camat dan Kantor Desa yang berupa data, struktur organisasi dan lainnya. Wawancara merupakan proses tanya jawab yang berlangsung secara lisan antara peneliti dan narasumber mengenai hal-hal yang perlu diketahui dalam penelitian. Wawancara berfokus dalam mengumpulkan informasi mengenai Pelaksanaan Tugas Camat dalam Membina Pemerintahan Desa.

Adapun subjek dari penelitian ini yang dijadikan narasumber atau *Key informan* adalah selaku Camat Tualang. Wawancara ini meliputi pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan indikator yang dibuat peneliti tentang Pelaksanaan Tugas Camat dalam Membina Pemerintahan Desa di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak yang berdasarkan indikator variabel penelitian, antara lain sebagai berikut:

- a. Memberikan Bimbingan
- b. Memberikan pengarahan
- c. Memberikan pendidikan dan pelatihan
- d. Literature buku petunjuk

1. Memberikan Bimbingan

Pemberian bimbingan adalah suatu usaha yang dilakukan oleh seorang pemimpin untuk mengajak, menggiring, menuntun, memotivasi, serta mendorong agar bawahan dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik serta dapat menjalankan segala aktivitas kegiatan sesuai dengan rencana.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan informan yang didasarkan pada indikator Memberikan Bimbingan dalam Membina Pemerintahan Desa Pinang Sebatang, berikut adalah petikan wawancara dengan Bapak Arie Darmawan, S.IP (Sekretaris Camat) di Kecamatan Tualang yang mengatakan:

“Tugas Camat berkaitan dengan pembinaan dan pengawasan Administrasi kampung, memberikan bimbingan supervisi fasilitasi pelaksanaan Administasi kepada desa atau kampung. Dimulai dari penetapan APBD yang mulai tahun ini dilimpahkan kepada Kecamatan. Dari situ nanti akan ada unsur pembinaan apa saja yang diusulkan oleh Kepala Desa, apabila telah memenuhi syarat dan ketentuan maka akan di setujui oleh Camat. Dari situ nanti selanjutnya maka akan dilakukan bimbingan kepada Pemerintahan Desa” (Arie Darmawan, S.IP Sekretaris Camat, 03 Maret 2021, 10.10 WIB)

Berdasarkan ungkapan diatas menjelaskan bahwa pembinaan berupa bimbingan supervisi fasilitasi pelaksanaan Administrasi telah dilakukan oleh Camat kepada Pemerintahan Desa Pinang Sebatang.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Kepala Desa Pinang Sebatang Bapak Bambang Saputra, S.H,M.H yang mengatakan bahwa:

“Camat ada memberikan pembinaan yaitu berupa bimbingan, bimbingan yang diberikan berupa arahan dalam musyawarah Desa. Arahan yang diberikan juga sudah sesuai dengan ketentuan yang ada” (Bambang Saputra, S.H,M.H Kepala Desa Pinang Sebatang, 09 Maret 2021, 10.24 WIB)

Berdasarkan ungkapan diatas yang diberikan Kepala Desa Pinang Sebatang, Pembinaan berupa bimbingan telah diberikan kepada Desa sesuai dengan ketentuan yang ada berupa arahan dalam musyawarah Desa.

Ada juga pendapat dari beberapa masyarakat yang berada di Desa Pinang Sebatang tersebut.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Bapak Sulaiman salah satu Masyarakat yang tinggal di Desa Pinang Sebatang, yang mengatakan:

“bapak tidak tau apakah Camat Memberikan bimbingan kepada Desa akan tetapi sekiranya memang sudah diberikan, semoga aparat Desa dapat bekerja sesuai dengan ketentuan yang Camat arahkan” (10 Maret, 11.06 WIB)

Dari hasil wawancara kepada salah satu masyarakat diatas, penulis menganalisis bahwa masyarakat tersebut tidak mengetahui mengenai bimbingan yang diberikan Camat kepada Pemerintahan Desa, namun aparat Desa sudah seharusnya bekerja sesuai dengan ketentuan yang ada.

Berdasarkan hasil wawancara kepada Ibu Helmi Yeta masyarakat Desa Pinang sebatang yang mengatakan:

“saya berfikir bahwa bimbingan pasti diberikan Camat kepada bawahannya termasuk Pemerintahan Desa, hanya saja apakah dilakukan dengan baik atau tidak itu tergantung kepada Kepala Desa. Sejauh ini saya mengurus sesuatu ke Kantor Desa terkadang cepat selesai tapi terkadang juga bertele-tele, tapi menurut saya masih lumayan bagus kerjanya” (10 Maret 2021, 11.42 WIB)

Dari wawancara diatas penulis menganalisis bahwa bimbingan yang diberikan Camat terhadap Pemerintah Desa telah diberikan dengan baik, hanya saja aparat Desa terkadang tidak melakukan tugas dan fungsi dengan baik sehingga kurangnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan.

Berdasarkan wawancara dan hasil observasi diatas dapat dilihat bahwa Pembinaan berupa Bimbingan telah dilakukan oleh Camat kepada Pemerintahan Desa, namun menurut masyarakat setempat Desa masih belum memberikan Pelayanan yang baik dan semaksimal mungkin, ini terlihat dari kurang puasnya masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan Desa.

Camat melakukan Bimbingan berupa supervisi fasilitasi administrasi kepada pemerintahan desa, dan masyarakat juga berharap dengan adanya bimbingan yang diberikan Camat ini dapat memaksimalkan kinerja Desa dan akan berbanding lurus dengan kepuasan masyarakat.

2. Memberikan Pengarahan

Pengarahan adalah suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua yang diarahkan mencapai sasaran sesuai perencanaan dari yang memberikan pengarahan, artinya

menggerakkan orang-orang agar mau bekerja dengan sendirinya atau penuh kesadaran secara bersama-sama yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan yang dikehendaki secara efektif dan efisien.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan responden Bapak Arie Darmawan, S.IP (Sekretaris Camat) dalam indikator Memberikan Pengarahan kepada Pemerintahan Desa Pinang sebatang, isi dari wawancara tersebut menjelaskan bahwa:

“mengenai pengarahan selalu kita berikan kepada Desa itu secara internal ya, pengarahan itu bisa harian berupa komunikasi setiap hari, bulanan berupa rapat rutin, pembinaan langsung atau surat menyurat. Dan juga pembinaan khusus juga bisa kita berikan kepada Bapekam langsung, baik pembinaan dari segi pemerintahan ataupun umum” (03 Maret 2021, 10.15 WIB)

Berdasarkan wawancara dan hasil observasi maka penulis menganalisis bahwa Pembinaan berupa Pengarahan telah dilakukan Camat kepada Kepala Desa dan juga Bapekam (Badan Perwakilan Kampung) berupa komunikasi harian dan juga pertemuan pada rapat bulanan, dan juga pembinaan khusus terhadap Bapekam baik pembinaan pemerintahan maupun pembinaan umum.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Bapak Bambang Saputa, S.H, M.H kepala Desa Pinang Sebatang, dari hasil wawancara ini Bapak Kepala Desa mengatakan bahwa:

“pengarahan-pengarahan pasti diberikan Kecamatan kepada Desa, atau biasa kita sebut disini kampung. Pengarahan diberikan dari Desa melakukan perencanaan, terus lanjut ke Pelaksanaan, dan hingga sampai ke pelaporan semua pasti diberikan arahan oleh Kecamatan” (09 Maret, 10.26 WIB)

Dari hasil wawancara diatas kepada Kepala Desa Pinang Sebatang penulis dapat menyimpulkan bahwa pembinaan berupa pengarahan diberikan Camat kepada Pemerintahan Desa dimulai dari Pengarahan perencanaan, lalu pelaksanaan, dan yang terakhir pelaporan.

Ada juga pendapat dari beberapa masyarakat yang berada di Desa Pinang Sebatang tersebut.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Bapak Sulaiman salah satu Masyarakat yang tinggal di Desa Pinang Sebatang, yang mengatakan:

“memang ada pembinaan berupa pengarahan yang dilakukan Camat kepada Desa dengan adanya pengarahan diharapkan Desa bisa memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat” (10 Maret 2021, 11.08 WIB)

Dari hasil wawancara bersama masyarakat yang berada di Desa Pinang sebatang penulis dapat menganalisis bahwa dengan adanya Pengarahan yang diberikan Camat kepada Pemerintahan Desa dapat memberikan peningkatan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

Berdasarkan wawancara kepada Ibuk Helmi Yeta sebagai Masyarakat Desa Pinang sebatang mengatakan bahwa:

“Camat telah melakukan pengarahan tetapi Desa masih belum memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat” (10 Maret 2021, 11.43 WIB)

Dari hasil wawancara bersama masyarakat penulis dapat menganalisis bahwa pengarahan sudah dilakukan Camat tetapi pelayanan Desa masih belum memuaskan masyarakat.

Berdasarkan wawancara dan hasil observasi diatas dapat dilihat bahwa Camat memberikan pembinaan berupa pengarahan kepada Pemerintahan Desa, pengarahan ini dilakukan rutin baik harian maupun bulanan.

Komunikasi rutin harian dalam memberikan pengarahan dapat berbentuk bertukar pesan, sedangkan pengarahan bulanan dapat berbentuk rapat rutin, pembinaan langsung dan surat menyurat. Pembinaan khusus juga dapat diberikan kepada Bapekam (Badan Perwakilan Kampung) baik dari segi pemerintahan maupun umum.

Pengarahan juga diterima Desa dari Camat pada setiap perencanaan, pelaksanaan dan juga pelaporan. Masyarakat juga berharap dengan adanya pengarahan rutin yang diberikan Camat kepada Pemerintahan Desa dapat meningkatkan pelayanan yang diberikan sehingga berbanding lurus dengan kepuasan masyarakat.

3. Memberikan Pendidikan dan Pelatihan

Pendidikan dimaksud adalah untuk membina kemampuan atau mengembangkan kemampuan dan pelatihan proses belajar mengajar yang menggunakan metode, jadi pendidikan merupakan suatu proses pembinaan, pengertian, pengetahuan, dan juga untuk menambahkan keterampilan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan informan yang didasarkan pada indikator Memberikan pendidikan dan pelatihan kepada Pemerintahan Desa Pinang Sebatang, berikut adalah petikan wawancara dengan Bapak Arie Darmawan, S.IP (Sekretaris Camat) di Kecamatan Tualang yang mengatakan:

“pembinaan berupa pemberian pendidikan dan pelatihan dilakukan Camat kepada pemerintahan Desa, ini berupa lomba desa yang diadakan untuk menilai melakukan pelatihan dan juga pendidikan kepada semua desa” (03 Maret 2021, 10.17 WIB)

Berdasarkan wawancara dan hasil observasi maka penulis menganalisis bahwa Camat melakukan pembinaan berupa pendidikan dan pelatihan melalui lomba desa.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Bapak Bambang Saputa, S.H, M.H kepala Desa Pinang Sebatang, dari hasil wawancara ini Bapak Kepala Desa mengatakan bahwa:

“pendidikan dan pelatihan pernah dilakukan beberapa kali oleh camat, pelatihan kepada staf desa mengenai pelayanan administrasi yang baik.” (09 Maret 2021, 10.28 WIB)

Berdasarkan wawancara dan hasil analisis penulis bahwa pelatihan telah dilakukan oleh Camat kepada para staf kantor Desa.

Dari wawancara dan hasil observasi diatas dapat dilihat bahwa pendidikan dan pelatihan telah diberikan oleh Camat kepada pemerintahan Desa Pinang Sebatang, pelatihan berupa pendidikan pelayanan administrasi yang baik sesuai dengan tugas dan ketentuan yang ada.

Dengan pendidikan dan pelatihan yang telah diberikan Camat kepada Pemerintah Desa Pinang Sebatang, masyarakat juga mengharapkan pelatihan yang diberikan menjadi panduan agar pelayanan dapat ditingkatkan dan menjadi lebih efektif dan efisien.

4. Literature Buku Petunjuk

Maksudnya ialah, pembinaan diberikan harus sesuai dengan peraturan yang tertulis sebagaimana mestinya agar mencapai tujuan yang dikehendaki.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan informan yang didasarkan pada indikator Memberikan pendidikan dan pelatihan kepada Pemerintahan Desa Pinang Sebatang, berikut adalah petikan wawancara dengan Bapak Arie Darmawan, S.IP (Sekretaris Camat) di Kecamatan Tualang yang mengatakan:

‘pembinaan telah dilakukan Camat sesuai dengan PP. No. 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, dimana Camat telah melakukan pembinaan dengan memberikan bimbingan, fasilitas, dan juga konsultasi serta melakukan evaluasi terkait adanya permasalahan yang ada dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa’ (03 Maret 2021, 10.19 WIB)

Berdasarkan wawancara dan hasil observasi maka penulis menganalisis bahwa Camat telah melakukan pembinaan sesuai dengan literatur buku petunjuk yaitu PP. No. 17 Tahun 2018, Camat juga memberikan bimbingan, fasilitas dan juga konsultasi terhadap pemerintahan desa.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Bapak Bambang Saputtreftsqaw, S.H, M.H kepala Desa Pinang Sebatang, dari hasil wawancara ini Bapak Kepala Desa mengatakan bahwa:

‘‘pembinaan telah dilakukan Camat sesuai dengan ketentuan yang ada, Camat juga telah melakukan tugasnya selama (2 periode) jadi telah cukup berpengalaman terbukti dari kinerjanya yang stabil dan juga selalu kondusif’’ (09 Maret 2021, 10.29 WIB)

Berdasarkan wawancara dan hasil observasi penulis dapat disimpulkan bahwa Camat telah melakukan pembinaan sesuai dengan literatur buku petunjuk, dilihat dari masa jabatan yang telah 2 periode kinerjanya cukup stabil dan kondusif.

Dari tanggapan dan hasil wawancara diatas mengenai indikator literature buku petunjuk, dapat dilihat bahwa Camat telah melakukan tugasnya dalam membina pemerintahan desa sesuai dengan literatur buku petunjuk yaitu PP. No. 17 Tahun 2017.

Pembinaan juga diberikan Camat dalam bentuk bimbingan, fasilitas, dan juga konsultasi terhadap pemerintahan desa. Evaluasi juga dilakukan terhadap permasalahan yang ada dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Kinerja Camat dalam membina pemerintahan desa juga dapat dilihat dari masa jabatan yang telah (2 periode) membuktikan kinerja yang cukup stabil dan juga kondusif.

C. Hasil Observasi

Berdasarkan dari hasil observasi yang penelitian yang dilakukan penulis. Penulis menyimpulkan bahwa Pelaksanaan Tugas Camat dalam Membina Pemerintahan Desa di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak sudah dilakukan, juga telah melakukan beberapa perbaikan agar layanan yang diberikan kepada masyarakat menjadi lebih efektif dan efisien tetapi masih ada keluhan yang dirasakan oleh masyarakat disaat mereka melakukan layanan. Hal itu terjadi dikarenakan aparatur desa masih belum memberikan pelayanan

yang semaksimal mungkin karena masih kurangnya pemahaman aparat desa terhadap pentingnya memberikan pelayanan terbaik terhadap masyarakat sehingga menimbulkan ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintahan desa. Seharusnya pihak Kecamatan Tualang dan Pemerintahan Desa Pinang Sebatang harus sering melakukan sosialisasi kepada aparat desa mengenai pentingnya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Pemerintahan Desa juga harus lebih menyereng tenaga kerja yang lebih berpengalaman dan berkompeten, sehingga mereka tidak merasa terbebani dengan tugas yang diembannya, juga terus selalu memberikan pendidikan dan pelatihan secara rutin agar aparat desa semakin ahli dibidangnya dan kinerjanya lebih efektif dan efisien.

D. Faktor Penghambat Pelaksanaan Tugas Camat dalam Membina Pemerintahan Desa di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak

Dalam Pelaksanaan Tugas Camat dalam Membina Pemerintahan Desa di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak ditemui beberapa hambatan dalam pelaksanaannya, yakni:

1. Sumber Daya Manusia yang dimiliki pemerintah desa yang tidak kompeten sehingga tidak dapat menjalankan tugas yang diembannya. Dampak dari keadaan semacam ini yaitu menimbulkan lemah dan lambatnya pemerintahan desa dalam memahami dan melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan desa
2. Kurangnya sosialisasi yang dilakukan Camat kepada pemerintahan desa tentang pentingnya melakukan pelayanan semaksimal mungkin, sehingga timbulnya ketidakpuasan pelayanan dari masyarakat

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta fokus penelitian tentang Pelaksanaan Tugas Camat dalam Membina Pemerintahan Desa di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, yang didapatkan dari hasil penelitian melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

- 1) Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penelitian tentang Pelaksanaan Tugas Camat dalam Membina Pemerintahan Desa di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, maka peneliti menyimpulkan bahwa Pelaksanaan Tugas Camat dalam Membina Pemerintahan Desa telah dilakukan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya, juga telah melakukan beberapa perbaikan agar layanan yang diberikan kepada masyarakat menjadi lebih efektif dan efisien tetapi masih ada keluhan yang terjadi oleh masyarakat. Hal itu terjadi dikarenakan aparatur desa masih belum memberikan pelayanan yang semaksimal mungkin karena masih kurangnya pemahaman aparatur desa terhadap pentingnya memberikan pelayanan terbaik terhadap masyarakat sehingga menimbulkan ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintahan desa.
- 2) Hambatan atau kendala dalam menjalankan Pelaksanaan Tugas Camat dalam Membina Pemerintahan Desa di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak yaitu karena masih kurangnya pemahaman aparatur desa terhadap pentingnya memberikan pelayanan terbaik terhadap masyarakat sehingga menimbulkan ketidakpuasan

masyarakat terhadap pelayanan pemerintahan desa. Sumber Daya Manusia yang dimiliki pemerintah desa yang tidak kompeten sehingga tidak dapat menjalankan tugas yang diembannya. Dan kurangnya sosialisasi yang dilakukan Camat kepada pemerintahan desa tentang pentingnya melakukan pelayanan semaksimal mungkin.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian diatas, maka penulis memberikan saran yang dapat dijadikan masukan dan bahan pertimbangan bagi Kecamatan Tualang dalam Membina Pemerintahan Desa Pinang Sebatang agar pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat berjalan secara maksimal. Adapun saran yang dapat diberikan sebagai berikut:

- 1) Disarankan kepada aparatur desa agar lebih mengedepankan pemahaman tentang pentingnya melakukan pelayanan terbaik dengan semaksimal mungkin agar tidak ada lagi keluhan dan ketidakpuasan yang dilakukan oleh masyarakat.
- 2) Disarankan agar Pemerintah dapat meningkatkan Sumber Daya Manusia dari segi aparatur desa sehingga lebih berkompetan dan dapat melaksanakan tugas yang diembannya dengan baik.
- 3) Camat harus lebih maksimal dalam memberikan sosialisasi lanjutan agar aparatur desa lebih memahami tentang pentingnya melakukan pelayanan dengan baik kepada masyarakat..

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Amin Ibrahim. 2004. *Pokok-Pokok Analisis Kebijakan Publik*. Mandar Maju: Bandung.
- Bratakusumah, Deddy Supriady dan Solihin, Dadang. 2004. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Gramedia
- Budiardjo, Miriam. 2009. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.
- Budiman, Arief. 1995. *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*. Gramedia: Jakarta.
- Bungin, Burhan. 2006. *Penelitian Kualitatif*. PT. Rajagrafindo: Jakarta.
- Chaidir, Ellydar. 2008. *Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia Pasca Perubahan Undang-undang 1945*. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.
- Cokroamijoyo, Bintoro, Haji. 1990. *Perencanaan Pembangunan*: Jakarta.
- Dapartemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*. PT. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.
- Edi Suharto. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*, Alfabeto: Bandung.
- Ismail, Maimunah. 2001. *Pengembangan Implikasi Keatas Pembangunan Masyarakat*. Dewan Bahasa dan Pustaka, Kementerian Pendidikan Indonesia: Kuala Lumpur.
- Labolo, Muhadam. 2008. *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Rajawali Pers: Depok.
- Miles, Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Universitas Indonesia: Jakarta.
- Mohammad Nazir. 1999. *Metode Penelitian*. Penerbit Ghalia Indonesia: Jakarta.
- Nawawi, Ismail. 2013. *Budaya Organisasi Kepemimpinan dan Kinerja*. PT. Fajar Iterpratama Mandiri: Jakarta.
- Ndraha, Taliziduhu. 1997. *Metodologi Ilmu Pemerintahan*. PT. Rineka Cipta: Jakarta.
- Ndraha, Talizidulu. 2011. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Rineka Cipta: Jakarta.
- Nurcholis, Hanif. 2005. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Grasindo: Jakarta.
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Erlangga: Jakarta.
- Pamudji. 1992. *Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia*. Bumi Aksara: Jakarta.
- Rachmawati, Ike Kusdyah. 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Andi: Yogyakarta.
- Rasyid, Muhammad Ryaas. 1998. *Kajian Awal Birokrasi Pemerintahan Politik Orde Baru*. Yarsif Watampone: Jakarta.

- Rauf Rahyunir, dan Maulidiah. 2005. *Pemerintahan Desa*. Zanafa publishing: Yogyakarta.
- Rauf Rahyunir, dan Munaf Yusri. 2015. *Lembaga Kemasyarakatan di Indonesia*. Zanafa: Yogyakarta.
- Robert L. Mathis, John H. Jackson; Penerjemah, Diana Angelica. 2006. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Salemba Empat: Jakarta.
- S.P, Siagian. 1987. *Manajemen Pegawai*. Gunung Agung. Jakarta.
- Sastropetro. 1988. *Partisipasi, Komunikasi, Persuasi, dan Disiplin dalam Pembangunan Nasional*. Alumni: Bandung.
- Saydam, Gouzali. 2000. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Djembatan. Jakarta.
- Sedarmayanti. 2004. *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. CV. Mandar Maju: Bandung.
- Siagian, P Sondang. 2001. *Kerangka Dasar Ilmu Administrasi*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Siagian, P Sondag. 1985. *Filsafat Administrasi*. Gunung Agung: Jakarta.
- Singarimbun, Masri dan Sofyan Efendi. 1995. *Metode Penelitian Survey*. LP3S: Jakarta.
- Soekanto, Seorjono. 2002. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali Pers: Jakarta.
- Sugiono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. CV. Alfabeta: Bandung.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Administrasi*. Penerbit Alfabeta: Bandung.
- Syafiie, Inu Kencana. 2007. *Ilmu Pemerintahan*. Mandar Maju: Bandung.
- Syafiie, Inu Kencana. 2011. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. PT. Rineka Cipta: Jakarta.
- The Liang Gie. 1997 *Administrasi Perkantoran Modern*. Liberty: Yogyakarta.
- Thoha, Miftah. 2009. *Kepemimpinan Dalam Manajemen*. Rajawali Pers: Jakarta.
- Thoha, Miftah. 1993 *Pembinaan Organisasi: Proses Diagnosa Dan Intervensi*. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Wasistiono Sadu dan M Irwan Tahir. 2006. *Prospek Pengembangan Desa*, Fokus Media: Bandung.
- Wasistiono, S. .2001. *Esensi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah*. Alqa Print: Bandung.
- Widjaja, HAW.2005. *Otonomi Desa*. Rajawali Pers: Jakarta.
- Widodo, Adnan. 2002. *Pola-pola Orang Pemerintahan*. PT. Maju Jaya: Jakarta.
- Wijaya, A.W. 1988. *Komunikasi Dalam Hubungan Masyarakat*. Bina Aksara: Jakarta.

Jurnal:

Sahri Muharam, Alsar Andri, Askarmin Harun. 2018. *“Peranan Camat dalam Membina Administrasi Pemerintahan Desa di Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi”* Universitas Islam Kuantan Singingi, Vol. 2 No. 2. Oktober 2018.

Syafhendry, Delpi Susanti. 2018. *“Evaluasi Tugas Camat dalam Membina Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu”* Universitas Islam Riau, Vol. 4 No. 1. Maret 2018

Nicko Saputra. 2014. *“Peran Camat dalam Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Harapan Baru Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Tahun 2012”* Universitas Riau, Vol. 1 No. 2. Oktober 2014

Alther Manengkey, Markus Kaunang, Ismail Rachman. 2018. *“Peran Camat dalam Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa”* Universitas Sam Ratulangi, Hal. 145-150

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Pemerintahan Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Sumber lain:

Skripsi

Kantor Camat Tualang